



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2018 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 – 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4723);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2018 – 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi strategi, program dan pilih tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dikoordinasi oleh BPBD.

- (2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.

### Pasal 3

- (1) Upaya penanggulangan bencana dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Program kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Peninjauan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi bencana.

### Pasal 4

Rincian Rencana Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengarusutamaan (mainstreaming) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan terus menjadi topik yang menarik sejak sepuluh tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi di wilayah Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Merujuk pada *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* ancaman bencana yang disebabkan oleh alam dan ataupun oleh ulah manusia dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*). Berbagai ancaman tersebut menyebabkan kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi bagi sumber daya yang berguna bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Pengenalan terhadap ancaman kerentanan serta kapasitas pada satu wilayah menjadi penting untuk identifikasi. Meskipun tidak cukup hanya

teridentifikasi, diperlukan strategi untuk mengelola ancaman, karena pada prinsipnya konsep pengurangan resiko bencana adalah kerentanan yang tinggi, kapasitas yang rendah akan memicu resiko ancaman bencana menjadi bencana. Tiga kata kunci ancaman, kerentanan dan kapasitas menjadi satu kesatuan dalam pengurangan risiko bencana yang kemudian di tuangkan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia diapit oleh benua Asia dan Australia merupakan negara yang sangat rawan terhadap bencana. Letak geografis dan struktur geologis di antara 3 lempeng bumi dan 2 sabuk gunung api dunia, yaitu sirkum pasifik dan sirkum mediterania (*Winchester, 2006*). Kondisi ini memberikan ancaman serius pada penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 237 juta jiwa (BPS 2010). Merujuk pada "*Global Assessment Report 2011*", Indonesia memiliki tingkat risiko absolut dengan tingkat kematian yang sangat tinggi atas bencana dari berbagai ancaman, tak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Secara geografis provinsi ini terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan pantai yang memiliki potensi dan ancaman bencana yang tinggi. Sejarah kejadian bencana yang besar seperti kejadian Gempabumi tektonik pada tanggal 27 Mei 2006 dengan guncangan 5,9 *Skala Richter*. Gempabumi tersebut telah mengakibatkan kerusakan hebat di kedua wilayah provinsi ini, berdasarkan data dari DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) menyebabkan korban sebanyak 4.626 jiwa, terluka sebanyak 19.202 jiwa dan 92.946 kerusakan bangunan permukiman, dan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas hidup 1.2 juta jiwa penduduk. Bukan hanya kejadian gempabumi, 26 Oktober 2010 terjadi aktivitas seismik yang menyebabkan meletusnya Gunung Merapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunung Merapi mencapai Rp. 3,86 triliun. Sebaran wilayah terdampak meliputi tiga kabupaten yaitu Sleman Propinsi Yogyakarta, Magelang dan Klaten Propinsi Jawa Tengah.

Selain gempabumi dan letusan gunungapi, Provinsi DIY masih memiliki potensi kejadian bencana lainnya. Seperti bencana tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim

dan abrasi, kekeringan, kegagalan teknologi dan banjir bandang. Bahkan dari semua jenis bencana tersebut sudah pernah terjadi. Dengan tingginya tingkat kerentanan dan potensi bahaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka tingkat risiko juga akan meningkat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan review terhadap dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2013-2017 sebagai langkah untuk melakukan pemutakhiran yang di sesuaikan dengan kondisi aktual di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Review dan penyusunan kembali Rencana Penanggulangan Becana menjadi penting untuk dilakukan untuk memandu pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menentukan langkah-langkah dalam melakukan upaya penanggulangan bencana yang mengancam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses review dan penyusunan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta ini melibatkan berbagai pihak terkait di skala provinsi dan kabupaten/kota, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat lokal, media serta pihak swasta; sehingga diharapkan isi dari RPB ini telah mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat lokal. Oleh karena itu, konsultasi dan transformasi kepada para pihak menjadi bagian penting dalam melakukan review dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2018-2022. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana telah berisikan substansi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta akan memiliki peranan penting dalam penurunan resiko bencana daerah (termasuk resiko jangka panjang) yang kemudian dapat menekan kerugian yang akan dialami daerah dan masyarakat lokal. Rencana ini dapat menjadi landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, sekaligus dalam rangka adaptasi terhadap bahaya alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalalaian manusia.

## **B. Tujuan**

RPB Daerah Istimewa Yogyakarta 2018-2022 disusun dengan tujuan:

1. Memperbaharui dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2013-2017 sesuai dengan kondisi aktual di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Menjadi pedoman daerah dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana
3. Menjadi dokumen sanding dalam penyusunan RKPD dan Renja-SKPD
4. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
5. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **C. Sasaran**

Sasaran dari RPB Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota (setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, swasta dan pemangku kepentingan lainnya) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Kedudukan Dokumen**

RPB Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan dokumen sandingan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Landasan Hukum**

RPB Daerah Istimewa Yogyakarta ini dibuat berdasarkan landasan idiologi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang Undang Dasar 1945. Landasan operasional hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017.;

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2013-2017
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;

#### **F. Ruang Lingkup Sistematika Penulisan**

RPB Daerah Istimewa Yogyakarta memuat rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kurun waktu 2018-2022 . Ruang lingkup RPB Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas ruang lingkup geografis, ruang lingkup tahap bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan. Berdasarkan lingkup geografis, RPB Daerah Istimewa Yogyakarta akan berlaku di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 kabupaten dan 1 kota (Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta). Berdasarkan lingkup tahap bencana, dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca-bencana beserta berbagai program dan kegiatan yang mendukung penanggulangan bencana.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Ruang lingkup tipe bencana di dalam RPB ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta telah dan berpotensi terdampak 12 jenis bencana (baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana yang diakibatkan oleh kegagalan teknologi), yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi,

gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, leusan gunung api, tanah longsor dan tsunami. Berdasarkan lingkup pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, 3 upaya yang tercantum di dalam RPB ini adalah pengurangan tingkat ancaman, pengurangan tingkat kerentanan, dan peningkatan kapasitas. Prioritas penanggulangan bencana ini sendiri akan disesuaikan dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini.

Dokumen RPB ini terdiri dari tujuh bab, berisikan beberapa point penting di antaranya adalah pentingnya pengarusutamaan bencana dalam perencanaan pembangunan, kondisi aktual di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sejarah kebencanaan. Strategi serta program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pihak sebagai upaya penurunan risiko bencana di wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil kajian risiko bencana tahun 2016 yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diskripsi ringkas pada setiap bab adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, kedudukan dokumen, landasan hukum, lingkup RPB.
- II. Gambaran Umum Kewilayahan, menguraikan gambaran umum wilayah DIY dan menarasikan sejarah kejadian bencana dan simpulan
- III. Analisa Risiko Bencana, memuat metodologi pengkajian resiko bencana dalam penyusunan RPB, menarasikan gambaran tingkat serta ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko tiap jenis bencana di DIY dan simpulan.
- IV. Kebijakan Penanggulangan Bencana. Menarasikan visi dan misi, strategi, sasaran dan kaidah pelaksanaan penanggulangan bencana.
- V. Strategi, Program dan Prioritas kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan dan simpulan.
- VI. Pelaporan, monitoring dan evaluasi
- VII. Penutup

Secara umum, keberadaan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut. Secara khusus, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, RPB akan memiliki peranan yang berbeda bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan peranannya di dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan RPB di dalam lingkup internal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terbatas pada fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota, dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digunakan sebagai acuan penyusunan RPB kabupaten/kota yang tentunya akan berisikan strategi dan program penanggulangan bencana yang telah disesuaikan dengan kondisi spesifik kabupaten/kota tersebut.

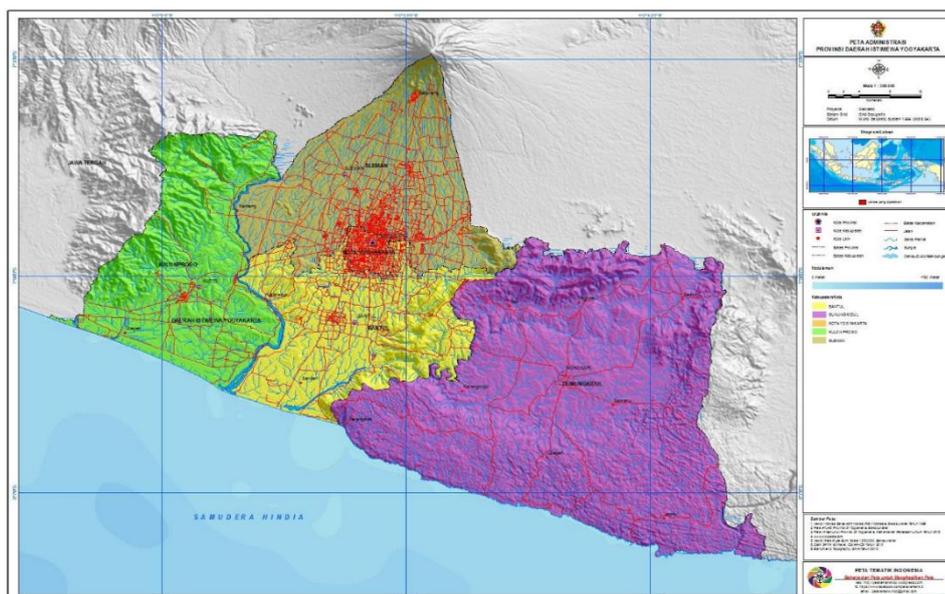
## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi: Kabupaten Klaten di sebelah timur laut, Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, Kabupaten Magelang di sebelah barat laut.

Posisi DIY terletak antara  $7^{\circ}33' - 8^{\circ}12'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}00' - 110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Secara administratif Provinsi DIY memiliki 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yang di dalamnya melingkupi 78 kecamatan dan 269 desa/kelurahan. Sebagian besar wilayah Provinsi DIY terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 63,18 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56 persen, ketinggian antara 500-999 m sebesar 4,79 persen dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 persen. Untuk peta administrasi wilayah Provinsi DIY dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Peta Administrasi Wilayah Provinsi DI Yogyakarta

Untuk pembagian wilayah administrasi beserta luas wilayah masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 2.1**.

**Tabel 2.1.** Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DIY

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kulonprogo	Wates	58.628,31	12	75
2	Bantul	Bantul	48.498,00	17	28
3	Gunung Kidul	Wonosari	148.536,00	18	139
4	Sleman	Sleman	57.482,00	17	27
5	Yogyakarta	Yogyakarta	3.250,00	14	-
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			<b>316.394,31</b>	<b>78</b>	<b>269</b>

Sumber: Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014

**Tabel 2.1** menjelaskan bahwa luas wilayah Provinsi DIY adalah seluas 316.394,31 Ha dengan Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten terluas yaitu sekitar 148.536 Ha sekaligus merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan dan kelurahan/desa terbanyak yang masing-masingnya adalah 18 kecamatan dan 139 kelurahan/desa. Sedangkan Kota Yogyakarta adalah kota terkecil dengan luas 3.250 Ha.

Berdasarkan data Daerah Dalam Angka Tahun 2014 Provinsi DIY, jumlah penduduk Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 2.2**.

**Tabel 2.2** Jumlah Penduduk di Provinsi DI Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Total Penduduk
1	Kulonprogo	388.869
2	Bantul	955.015
3	Gunung Kidul	683.735
4	Sleman	1.141.733
5	Yogyakarta	402.679
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>		<b>3.572.031</b>

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2014

**Tabel 2.2** menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi DIY adalah 3.572.031 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah sejumlah 1.141.733 jiwa yang terdapat di Kabupaten Sleman, berikutnya sejumlah 955.015 jiwa yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan untuk wilayah dengan penduduk paling sedikit terdapat di Kota Yogyakarta dengan jumlah 402.679 jiwa.

Berdasarkan bentang alam, wilayah Provinsi DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar wilayahnya terletak antara 100-499 meter dari permukaan laut tercatat sebesar 65,65%, ketinggian kurang dari 100 meter sebesar 28,84%, ketinggian 500-999 meter sebesar 5,04% dan ketinggian di atas 1000 meter sebesar 0,47%. Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara rata-rata di Provinsi DIY Tahun 2013 menunjukkan angka 26,08°C lebih rendah dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2012 yang tercatat sebesar 27,21° C, dengan suhu minimum 18,4°C dan suhu maksimum 35,7°C. Curah hujan perbulan sekitar 230 mm dengan hari hujan per bulan 15 kali. Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 44,0–98,0 persen, tekanan udara antara 1009,9-1.019,4 mb, dengan arah angin Barat dan kecepatan angin antara 2,0 knot sampai dengan 6,0 knot.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya potensi bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Risiko menghadapi bencana alam dan kerentanan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggi mengisyaratkan perlunya perencanaan pengurangan risiko bencana yang lebih serius dan tertata. Potensi bencana yang ada, baik yang diakibatkan oleh alam, non alam, maupun gejolak sosial di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kerentanan masyarakat yang tinggi (rendahnya tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat), memerlukan upaya meningkatkan kapasitas, menurunkan kerentanan dan mengelola ancaman guna mengurangi risiko terhadap bencana. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana menjadi dokumen yang sangat penting untuk memandu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pemangku kepentingan yang lain dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana terpadu dan terstruktur.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang ada sebestumnya pada tahun 2013-2017, perlu di lakukan perbaharuan dengan kondisi existing yang ada saat ini di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pergeseran kesepakatan global

yang terbaru. Setidaknya ada 3 kesepakatan global yang berkontribusi terhadap skema Pengurangan Risiko Bencana di tingkat regional, nasional dan daerah. Perkembangan kesepakatan global tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada tentu harus menjadi rujukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.

Kesepakatan global dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015-2030, meneruskan/menggantikan Kerangka Kerja Aksi Hyogo untuk Pengurangan risiko bencana tahun 2005-2015, yang menggerakkan upaya pengurangan risiko bencana internasional ke dalam 4 (empat) prioritas:
  - a. Memahami risiko bencana;
  - b. Penguatan tatakelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana;
  - c. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan;
  - d. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “membangun kembali lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
2. Di tetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 meneruskan *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015. Terdapat 17 Capaian, dengan 8 target luar biasa , dari kemiskinan sampai hak asasi manusia & stabilitas keamanan. Salah satu focus dari SDGs terletak pada tujuan 11 yaitu Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana.
3. Paris Agreement yang telah di sepakati pada akhir tahun 2015 dengan target Membatasi temperatur global, peningkatan pengurangan emisi yang menahan laju pemanasan global di bawah 2.0oC atau bahkan 1.5oC, dan memastikan target nasional, Indonesia emisi hanya 16%.

## **B. Sejarah Kebencanaan**

Merujuk pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sejarah kejadian bencana di tingkat nasional kurun oktober 2016 tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 1.928, dengan korban meninggal 478 jiwa dan korban menderita dan mengungsi

sebanyak 2.421.619 sedangkan kerusakan pemukiman sebesar 30.763. Terlampir **Tabel 3** jumlah Kejadian Bencana, Korban, dan Dampaknya sampai bulan Oktober 2016 di tingkat Nasional.

**Tabel 2.3** jumlah Kejadian Bencana, Korban, dan Dampaknya

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Kerusakan (unit)						
		Meninggal & Hilang	Luka-Luka	Menderita & Mengungsi	Rumah				Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
					Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam			
AKSI TEROR / SABOTASE	1	7	20	0	0	0	0	0	0	0	0
BANJIR	639	134	104	2.210.114	2.071	1.018	5.242	214.079	16	199	277
BANJIR DAN TANAH LONGSOR	53	46	7	77.552	382	1.552	1.262	15.526	11	19	17
GELOMBANG PASANG / ABRASI	20	0	0	631	32	13	17	589	0	0	1
GEMPA BUMI	10	2	42	972	390	1.036	3.036	0	3	5	10
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	178	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0
KECELAKAAN TRANSPORTASI	17	103	61	0	0	0	0	0	0	0	0
LETUSAN GUNUNG API	7	7	2	86.654	0	0	0	0	0	0	0
PUTING BELIUNG	536	17	138	9.610	1.448	1.629	8.977	0	4	32	51
TANAH LONGSOR	464	160	82	35.625	955	865	838	303	9	24	27
<b>TOTAL</b>	<b>1.925</b>	<b>478</b>	<b>457</b>	<b>2.421.162</b>	<b>5.278</b>	<b>6.113</b>	<b>19.372</b>	<b>230.497</b>	<b>43</b>	<b>279</b>	<b>383</b>

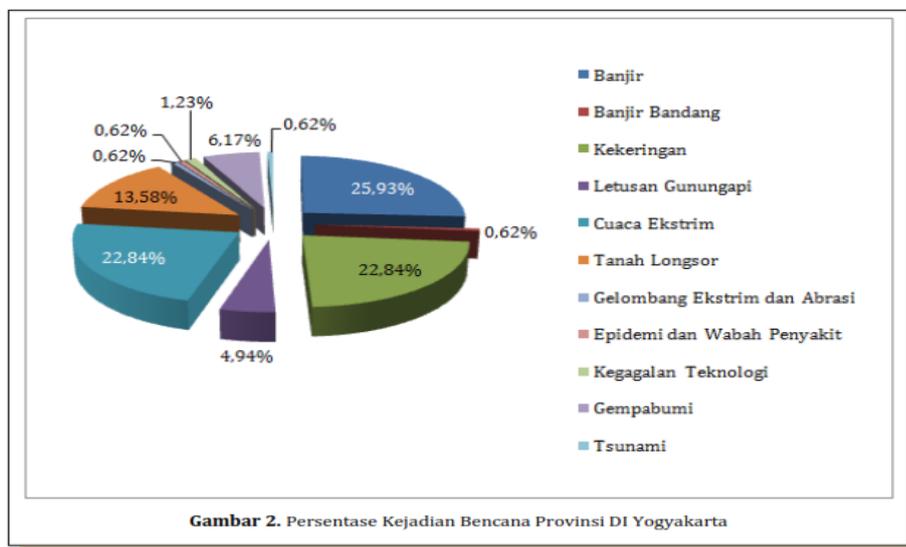
Pada level Provinsi DIY data dan informasi kebencanaan yang tersedia kurun waktu 1885-2015. Data tersebut di kompilasi berdasarkan pencatatan kejadian bencana pada Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DIY Tahun 2013 dan sejarah kejadian bencana tahun 2012-2015. Jenis bencana untuk sejarah kejadian bencana disesuaikan dengan lingkup bahaya merujuk pada Data dan Informasi (DIBI) BNPB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2.4**.

**Tabel 2.4.** Sejarah Kejadian Bencana Provinsi DI Yogyakarta Tahun 1885-2015

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENING GAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNG SI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (Ha)
Banjir	42	4	9	-	1.739	139	-	154
Banjir Bandang	1	-	-	-	-	-	-	32
Kekeringan	37	-	-	-	-	-	-	88
Letusan Gunungapi	8	4.249	186	-	11.459	2	-	-
Cuaca Ekstrim	37	24	116	-	790	226	1.417	-
Tanah Longsor	22	39	16	1	1.342	47	500	-
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	-	-	-	29	-
Epidemi dan Wabah Penyakit	1	16	-	-	-	-	-	-
Kegagalan Teknologi	2	75	119	-	-	-	-	-
Gempabumi	10	4.923	22.406	-	1.403.617	95.903	107.048	-
Tsunami	1	3	3	-	-	-	-	-
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>	<b>162</b>	<b>9.333</b>	<b>22.855</b>	<b>1</b>	<b>1.418.947</b>	<b>96.317</b>	<b>108.994</b>	<b>274</b>

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2015 dan Dokumen RPB 2011

Berdasarkan **tabel 2.4** dapat dijelaskan bahwa kejadian bencana yang paling sering terjadi di Provinsi DIY dari tahun 1885-2015 adalah bencana banjir dengan 42 kejadian dari 162 jumlah kejadian. Bencana ini telah menyebabkan korban jiwa sebanyak 4 (empat) orang, 9 (sembilan) orang luka-luka, 1.739 orang mengungsi. Sedangkan bencana yang memberikan dampak kerugian terbesar adalah letusan gunungapi dan gempabumi, bencana ini pernah terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kejadian letusan gunungapi dan 10 kali kejadian gempabumi. Kejadian bencana tersebut menyebabkan tingginya jumlah korban jiwa dan besarnya dampak kerugian fisik. Untuk melihat persentase tingkat kejadian dari masing-masing kejadian bencana dapat dilihat pada **gambar 2.2**.



**Gambar 2.2** menjelaskan bahwa banjir sebagai bencana dengan tingkat kejadian tertinggi dengan persentase 25,93% dari total kejadian bencana selama tahun 1885-2015. Selanjutnya adalah cuaca ekstrim dan kekeringan dengan persentase yang sama yaitu 22,84%. Sedangkan persentase kejadian bencana yang terendah yaitu kejadian bencana gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit dan tsunami dengan persentase 0,62%. Merujuk pada Data dan Informasi Indonesia (DIBI) di tingkat wilayah Propinsi DIY, tren jumlah bencana yang terjadi kurun waktu 2016 mengalami peningkatan signifikan sebanyak 89% di bandingkan tahun 2015. Dampak yang di akibatkan adanya bencana sangat merugikan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat pada erbagai sektor, pariwisata, pertanian, industri, transportasi dan perikanan.

### C. Potensi Bencana

Laju pertumbuhan pembangunan yang semakin pesat di wilayah Propinsi DIY mampu berkontribusi terhadap ketangguhan daerah jika pembangunan yang di lakukan tidak memberikan risiko-risiko baru dan focus pada keberkelanjutan sumber daya. Oleh karenanya pembangunan dan pengurangan risiko bencana menjadi satu titik temu untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan risiko bencana daerah. Untuk mengintegrasikan risiko-risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah perlu teridentifikasi potensi bencana di daerah. Potensi bencana di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah kejadian bencana yang diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan hasil analisis untuk bencana yang berkemungkinan terjadi. Analisis dilakukan berdasarkan kondisi aktual pada wilayah Propinsi DIY. Penentuan jenis potensi bencana sangat erat dengan rencana upaya Rencana Penanggulangan Bencana kedepan di wilayah DIY. Berdasarkan gambaran umum, sejarah kebencanaan dan hasil refrensi dari berbagai studi dan kajian, maka diperoleh 12 potensi bencana di Provinsi DIY. Adapun jenis potensi bencana yang terdapat di wilayah Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 2.5**.

**Tabel 2.5** Potensi Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

Potensi Bencana Di Provinsi Di Yogyakarta	
1. Banjir	7. Kebakaran hutan dan lahan
2. Banjir Bandang	8. Letusan Gunungapi
3. Gempabumi	9. Tsunami
4. Tanah Longsor	10. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5. Kekeringan	11. Kegagalan teknologi
6. Cuaca Ekstrim	12. Epidemi dan wabah penyakit

*Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2015*

**Tabel 2.5** menjelaskan bahwa Provinsi DIY terancam oleh semua jenis bencana yang berpotensi di Indonesia. Hal ini terjadi karena keadaan wilayah Provinsi DIY yang sangat kompleks dan beranekaragam. Pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2018-2028, terdapat perbedaan dengan jenis penamaan bencana baru yaitu banjir bandang dan di keluarkannya konflik sosial dari potensi bencana. Uraian kenapa di masukan banjir bandang merujuk pada metodologi pengkajiannya oleh BNPB. Pad kejadian dan upaya strategi pengurnagan risiko bencana dan upaya

penanggulangan bencana untuk banjir dan banjir bandang akan sangat berbeda. Banjir bandang terjadi dengan tempo singkat dan dampaknya bisa sangat uas, sedangkan banjir bisa terjadi dalam tempo yang cukup lama dan mengenang. Sedangkan ntuk bencana konflik sosial sekarang tidak dilakukan pengkajian dan tidak termasuk dalam 12 jenis bencana yang telah diatur dalam kerangka acuan kerja yang dikeluarkan oleh BNPB. Hal tersebut terjadi karena bencana konflik sosial tidak lagi menjadi tanggung jawab dan wewenang BNPB namun sudah dialihkan kepada POLRI.

#### **D. Simpulan**

Kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan melalui pertimbangan-pertimbangan risiko bencana pada suatu wilayah tidak bisa di abaikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan rata-rata kerugian ekonomi negara akibat bencana alam mencapai Rp30 triliun setiap tahunnya. Hal ini bisa di jelaskan bahwa kejadian bencana di Indonesia dari 2002 sampai 2016 meningkat dan 95 persen diantaranya didominasi oleh bencana hidro meteorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan. Pada kontek Daerah Istimewa Yogyakarta 12 ancaman yang terjadi telah teridentifikasi berdampak pada kerugian fisik, ekonomi sosial dan lingkungan. Tren jumlah bencana yang terjadi kurun waktu 2016 mengalami peningkatan signifikan sebanyak 89% di bandingkan tahun 2015. Rencana Penanggulangan Bencana menjadi salah satu cara bagaimana mengelola ancaman agar mampu memiimalkan risiko bencana di wilayah Yogyakarta.

Pembangunan di DIY harus mampu menguatkan ketangguhan daerah dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana. Namun begitu di satu sisi pembangunan juga dapat berkontribusi terhadap risiko-risiko baru jika tidak di dasarkan pada 12 jenis ancaman yang berpotensi menjadi bencana di wilayah DIY. Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2018-2022 harus mampu menjawab strategi penanggulangan bencana dari 12 ancaman yang ada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen RPB juga harus terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah yang kemudian di turunkan kedalam Rencana Aksi Daerah (RAD). Dokumen RPB juga harus mampu memberikan rujukan dan atau acuan bagi OPD dan multi pihak dalam menyusun rencana kerjas strategis untuk mengurangi risiko bencana pada wilayah DIY.

## **BAB III**

### **ANALISA RISIKO BENCANA**

#### **E. Pengantar**

Pengelolaan Bencana pada prinsipnya secara sederhana di gambarkan dengan mengelola ancaman, menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Bencana akan terjadi dan menimbulkan dampak kerugian bila skala dari ancaman terlalu tinggi, kerentanan terlalu besar, dan kapasitas serta kesiapan yang dimiliki masyarakat atau pemerintah tidak cukup memadai untuk mengatasinya. Ancaman atau bahaya tidak akan menjadi bencana apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun korban jiwa. Secara teknis, bencana terjadi karena adanya ancaman dan kerentanan yang bekerjasama secara sistematis serta dipicu oleh faktor-faktor luar sehingga menjadikan potensi ancaman yang tersembunyi muncul ke permukaan sebagai ancaman nyata.

Kajian risiko bencana adalah landasan untuk memilih strategi yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Dimana komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pengkajian ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, kajian risiko juga menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Kajian risiko bencana tahun 2015 menghasilkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi DIY dengan masa perencanaan 2016 sampai 2019. Peninjauan dan pengembangan dilakukan secara berkala minimal sekali dalam 5 (lima) tahun. Agar data dan informasi dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah terkini untuk melakukan pengkajian terhadap semua jenis bencana yang berpotensi di Provinsi DIY.

#### **F. Metode**

Analisa risiko bencana terdiri dari komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Selain tingkat risiko, analisa diharapkan mampu menelaah peta risiko

untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Analisa pada peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat hasil analisa risiko bencana diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Tingkat risiko bencana di suatu daerah bergantung pada tingkat bahaya kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam. Untuk membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan, hubungan antara bahaya, kerentanan dan kapasitas digambarkan melalui pendekatan berikut:

R = Risiko Bencana

H = Bahaya

V = Kerentanan

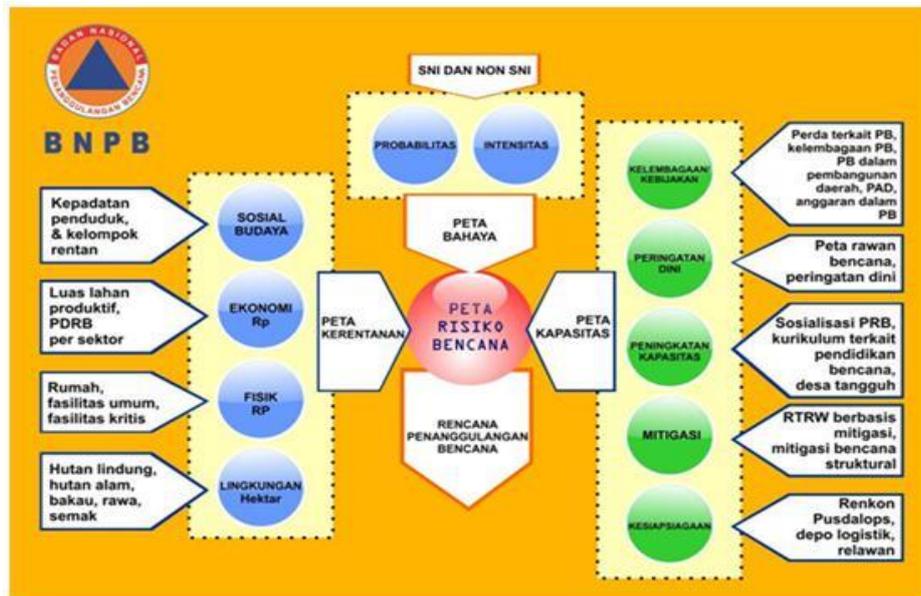
C = Kapasitas

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Pengkajian risiko bencana pada dasarnya dilakukan dengan menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko bencana tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Kajian risiko bencana yang dilakukan ini akan berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraa perencanaan penanggulangan bencana di Provinsi DIY. Penyelenggaraan yang dilakukan adalah untuk mengurangi risiko bencana di Provinsi DIY. Mengurangi risiko bencana dapat dilakukan dengan cara memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan kawasan yang terancam dan meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan cara mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan bencana dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya bencana, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai institusi aktif dalam kebencanaan tingkat nasional terus melakukan pengembangan terhadap pengkajian risiko bencana. Pengembangan tersebut juga diselaraskan dengan metodologi pengkajian risiko bencana yang sudah disusun oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pengkajian risiko bencana untuk tahun 2015 juga harus disesuaikan dengan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum

Pengkajian Risiko Bencana. Metode pengkajian risiko bencana yang dilaksanakan dapat dilihat pada **Gambar 3.1** :



**Gambar 3.1 Metode Pengkajian Risiko Bencana**

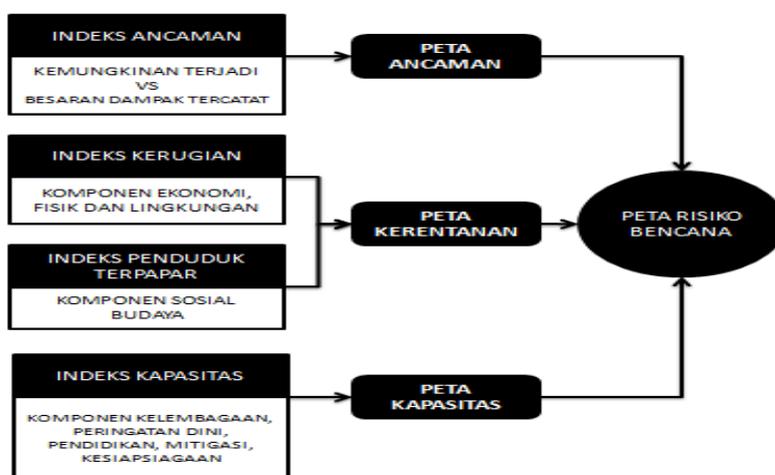
**Gambar 3.1** menjelaskan bahwa peta risiko bencana merupakan hasil kajian risiko bencana yang diperoleh dari gabungan peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas. Gambar di atas juga menjelaskan komponen penyusun masing-masing peta tersebut. Peta bahaya dibuat berdasarkan probabilitas dan intensitas terjadinya bencana. Peta kerentanan dibuat berdasarkan komponen sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan hidup. Peta kapasitas diperoleh dari kelembagaan/kebijakan terkait, peringatan dini, peningkatan kapasitas dan mitigasi.

Kajian risiko bencana di Provinsi DIY diawali dengan pengambilan data yang diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Indeks pengkajian risiko bencana dihitung per komponen risiko, yaitu indeks bahaya, indeks kerentanan yang diperoleh dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian, serta indeks kapasitas. Berdasarkan indeks-indeks tersebut disusun peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana. Pemetaan tersebut dirangkum sehingga dapat diambil kesimpulan tingkat risiko bencana di suatu daerah. Sub bab-sub bab berikut membahas lebih mendalam indkes pengkajian risiko bencana, peta risiko bencana dan kajian risiko bencana Provinsi DIY.

Analisa risiko bencana di lakukan untuk memberikan arahan yang menghasilkan sebuah kebijakan penanggulangan bencana yang di dasarkan pada analisa pada komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Analisa risiko bencana di susun berasarkan hasil pengkajian risiko bencana yang terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Dokumen Kajian Resiko Bencana
2. Peta Risiko Bencana.

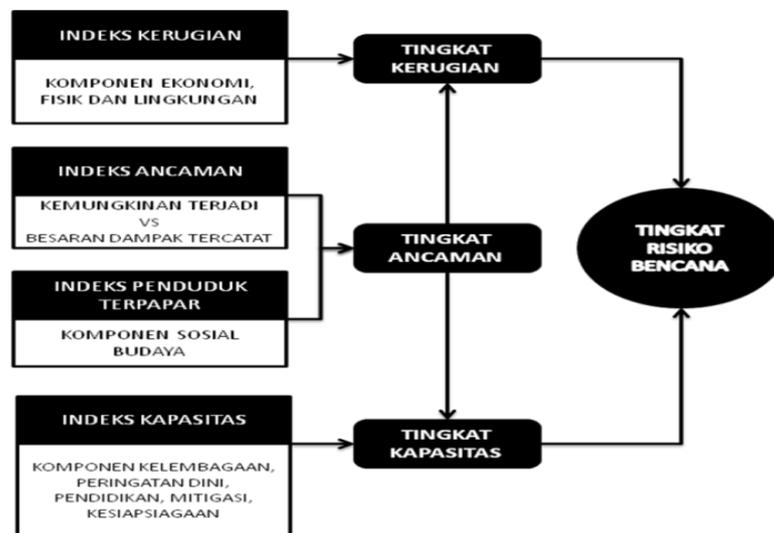
Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Peta Risiko Bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen Kajian Risiko Bencana. Selain itu Dokumen Kajian Bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Metode Pemetaan Risiko Bencana dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



**Gambar 3.2 Pemetaan Risiko Bencana**

Pada **Gambar 3.2** menjelaskan bahwa Peta Risiko Bencana merupakan penggabungan (*overlay*) dari Peta Ancaman, Peta Kerentanan dan Peta Kapasitas. Peta-peta tersebut diperoleh dari berbagai indeks yang dihitung dari data-data dan metode perhitungan tersendiri. Penting untuk dicatat bahwa peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. Metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman.

Metode penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.

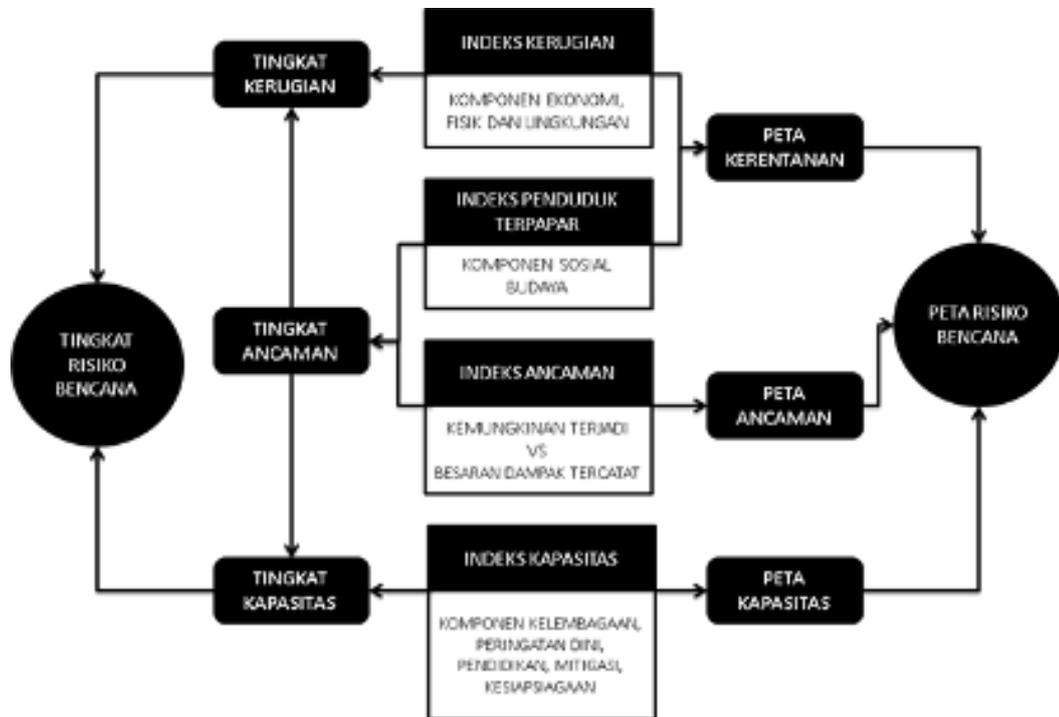


**Gambar 3.3 : Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana**

**Gambar 3.3** memperlihatkan bahwa Kajian Risiko Bencana diperoleh dari indeks dan data yang sama dengan penyusunan Peta Risiko Bencana. Perbedaan yang terjadi hanya pada urutan penggunaan masing-masing indeks. Urutan ini berubah disebabkan jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan rupiah. Oleh karena itu, Tingkat Ancaman yang telah memperhitungkan Indeks Ancaman di dalamnya, menjadi dasar bagi perhitungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas. Gabungan Tingkat Kerugian dan Tingkat Kapasitas merupakan Tingkat Risiko Bencana.

Seperti yang terlihat pada **Gambar 3.2** dan **Gambar 3.3**, korelasi antara metode penyusunan Peta Risiko Bencana dan Dokumen Kajian Risiko Bencana terletak pada seluruh indeks penyusunannya. Indeks-indeks tersebut bila diperhatikan kembali

disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah dipaparkan pada Gambar 3.2 Korelasi penyusunan Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan Metode Umum Pengkajian Risiko Bencana Indonesia, dapat dilihat pada **Gambar 3.4**.



**Gambar 3.4 : Korelasi penyusunan Peta dan Dokumen Kajian Risiko Bencana**

## G. Indek Risiko Bencana

Analisa risiko bencana di lakukan berdasarkan indeks bahaya, indeks kerentanan (indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian), dan indeks kapasitas. Perhitungan nilai indeks tergantung kepada jenis bahaya yang akan dilakukan pengkajiannya. Hasil analisis masing-masing indeks dalam dokumen kajian risiko bencana ini dijabarkan per kabupaten/kota yang terkena dampak.

### 1. Bahaya

Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi di suatu daerah. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di daerah tersebut. Dari potensi bencana yang ada di suatu daerah maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di daerah tersebut. Terdapat 12 jenis bahaya telah diatur dan disamakan penamaannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Indonesia. Penentuan jenis dan tingkat bahaya merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah kajian risiko bencana. Indeks bahaya merupakan komponen penyusun peta bahaya suatu daerah. Indeks bahaya disusun berdasarkan data dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di suatu daerah. Analisis indeks bahaya didapatkan berdasarkan jenis potensi bencana yang terjadi. Dari potensi bencana yang ada maka dapat diperkirakan potensi besaran luas bahaya terdampak bencana. Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah (0,000 - 0,333), sedang (>0,333 - 0,666) dan tinggi (>0,666 – 1,000).

Adapun data yang digunakan untuk menganalisis kajian risiko nantinya adalah data dari Kemendagri tahun 2015, baik data luas wilayah maupun data jumlah penduduk. Data terkait jumlah penduduk datanya hasil proyeksi tahun 2010 ke tahun 2015. Pengambilan data dari Kemendagri ini merupakan anjuran dari BNPB untuk perlakuan sama dalam melakukan analisis kajian risiko di semua wilayah. Namun, ada beberapa daerah yang tidak tersedia semua data-data yang dibutuhkan dalam analisis.

Rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi di Provinsi DIY, dapat dilihat pada **tabel 3.1 terkait tingkat ancaman di wilayah Propinsi DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Banjir	158.551	Tinggi
2	Banjir Bandang	3.059	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	287.466	Sedang
4	Epidemi Dan Wabah Penyakit	20.317	Rendah
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	2.476	Sedang
6	Gempabumi	313.315	Tinggi
7	Kebakaran Hutan Dan Lahan	12.757	Tinggi
8	Kegagalan Teknologi	1.901	Tinggi
9	Kekeringan	313.315	Tinggi
10	Letusan Gunungapi Merapi	7.755	Tinggi
11	Tanah Longsor	44.458	Tinggi
12	Tsunami	7.522	Tinggi

**Tabel 3.1 terkait tingkat ancaman di wilayah Propinsi DIY**

**Tabel 3.1** memperlihatkan bahwa indeks bahaya seluruh potensi di Provinsi DIY berada pada kelas rendah, sedang hingga tinggi. Adapun bencana dengan kelas bahaya rendah yaitu epidemi dan wabah penyakit, bencana yang memiliki kelas bahaya sedang yaitu cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan bencana yang memiliki kelas bahaya tinggi yaitu banjir bandang, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kegagalan teknologi, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan dan tsunami. Penentuan indeks tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya yang paling besar, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam Provinsi DIY.

Hasil data kajian pada tabel di atas diperoleh berdasarkan parameter yang digunakan oleh BNPB, yaitu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Dari parameter tersebut, didapatkan indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi di Provinsi DIY. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut.

a. Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke dalam tanah. Kejadian bencana banjir dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya banjir adalah sebagai berikut :

1. Daerah rawan banjir (divalidasi dengan atau kejadian)
2. Kemiringan lereng
3. Jarak dari sungai
4. Curah hujan

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya banjir per kabupaten/kota untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **3.2 tentang Potensi luas Banjir di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	28.600	Sedang
2	Bantul	35.051	Sedang
3	Gunungkidul	42.808	Sedang
4	Sleman	48.842	Sedang
5	Yogyakarta	3.250	Tinggi
Yogyakarta		<b>158.551</b>	<b>Tinggi</b>

**Tabel 3.2 Potensi luas Banjir di wilayah DIY**

**Tabel 3.2** memperlihatkan luas terdampak, kelas bahaya banjir di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya banjir. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya banjir di Provinsi DIY adalah 158.551 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

b. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

Kejadian bencana banjir bandang dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan oleh BNPB dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya banjir bandang adalah sungai utama, elevasi/topografi dan potensi longsor di hulu sungai (kelas tinggi).

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya banjir bandang untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **3.3 tentang Potensi luas Banjir Bandang di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	415	Tinggi
2	Bantul	2.007	Tinggi
3	Gunungkidul	637	Tinggi
Yogyakarta		<b>3.059</b>	<b>Tinggi</b>

**Tabel 3.3 : tentang Potensi luas Banjir Bandang di wilayah DIY**

Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya banjir bandang adalah 3.059 Ha dengan kelas bahaya tinggi tersebar di 3 kabupaten.

c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi adalah naiknya air laut yang disertai dengan ombak yang besar akibat adanya tarikan gravitasi bulan. Bila gelombang pasang disertai dengan angin kencang, maka gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan benda-benda lainnya yang ada di tepi pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Abrasi adalah terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air.

Kejadian bencana gelombang ekstrim dan abrasi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebagai berikut:

1. Tinggi Gelombang
2. Arus (Current)
3. Tutupan Vegetasi
4. Bentuk Garis Pantai
5. Tipologi Pantai

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.4 tentang Potensi luas Banjir Bandang di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	542	Sedang
2	Bantul	353	Sedang
3	Gunungkidul	1.581	Sedang
Yogyakarta		<b>2.476</b>	Sedang

**Tabel 3.4 : tentang Potensi luas Banjir Bandang di wilayah DIY**

Dari **tabel 3.4**, terlihat bahwa Provinsi DIY untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berada pada kelas sedang. Hal tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya terdampak yang paling besar/luas. Dimana dari tabel terlihat bahwa total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah 2.476 Ha.

**d. Kekeringan**

Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Hal ini erat sekali hubungannya dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Pengurangan fungsi tersebut disebabkan karena rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan. Dampak dari kekeringan ini adalah gagal panen, kekurangan bahan makanan hingga dampak yang terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi bahkan kematian. Potensi kejadian kekeringan dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB.

Kejadian bencana kekeringan dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya kekeringan adalah kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi).

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya kekeringan untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.5 tentang Potensi luas Kekeringan di wilayah DIY**.

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	58.628	Sedang
2	Bantul	50.813	Sedang
3	Gunungkidul	143.142	Tinggi
4	Sleman	57.482	Sedang
5	Yogyakarta	3.250	Sedang
Yogyakarta		<b>313.315</b>	<b>Tinggi</b>

**Tabel 3.5 : Tentang Potensi luas Kekeringan di wilayah DIY**

Dari **tabel 3.5**, terlihat bahwa Provinsi DIY untuk bahaya kekeringan berada pada kelas tinggi. Hal tersebut diperoleh berdasarkan luas terpapar bahaya terdampak yang paling besar/luas. Dimana dari tabel terlihat bahwa total luas bahaya kekeringan adalah 313.315 Ha.

e. Letusan Gunungapi

Letusan gunungapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

Kejadian bencana letusan gunungapi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya letusan gunungapi adalah zona aliran dan zona jatuhan.

Pengkajian bahaya letusan gunungapi dilakukan terhadap Gunungapi Sleman yang ada di Provinsi DIY. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunungapi Sleman untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.6 tentang Potensi luas Letusan Gunung Api di wilayah DIY**.

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Sleman	7.755	<b>Tinggi</b>
Yogyakarta		7.755	<b>Tinggi</b>

**Tabel 3.6 tentang Potensi luas Letusan Gunung Api di wilayah DIY**

**Tabel 3.6** memperlihatkan luas terdampak, kelas bahaya letusan Gunungapi Sleman di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan satu kabupaten/kota yang terpapar bahaya letusan Gunungapi Sleman. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya letusan Gunungapi Sleman di Provinsi DIY adalah 7.755 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

**f. Cuaca Ekstrim**

Cuaca Ekstrim atau angin puting beliung merupakan salah satu bencana yang berpotensi dan pernah terjadi di Provinsi Yogyakarta. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Kejadian bencana cuaca ekstrim dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya cuaca ekstrim adalah keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya cuaca ekstrim untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.7 tentang Potensi luas Cuaca Esktrim di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	58.627	Sedang
2	Bantul	49.047	Sedang
3	Gunungkidul	122.088	Sedang
4	Sleman	54.454	Sedang
5	Yogyakarta	3.250	Sedang
Yogyakarta		<b>287.466</b>	Sedang

**Tabel 3.7 : tentang Potensi luas Cuaca Esktrim di wilayah DIY**

**Tabel 3.7** memperlihatkan luas terdampak, kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya cuaca ekstrim. Berdasarkan

pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi DIY adalah 287.466 Ha dengan kelas bahaya sedang.

**g. Tanah Longsor**

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Tanah longsor menurut ESDM adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana ini adalah lereng yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Air hujan adalah pemicu utama terjadinya tanah longsor. Ulah manusia pun bisa menjadi penyebab tanah longsor seperti penambangan tanah, pasir dan batu yang tidak terkendalikan.

Kejadian bencana tanah longsor dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya tanah longsor adalah zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng.

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya tanah longsor untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.8 tentang Potensi luas Tanah Longsor di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	17.215	Tinggi
2	Bantul	6.449	Tinggi
3	Gunungkidul	17.127	Tinggi
4	Sleman	3.667	Tinggi
Yogyakarta		<b>44.458</b>	Tinggi

**Tabel 3.8 : Tentang Potensi luas Tanah Longsor di wilayah DIY.**

**Tabel 3.8** memperlihatkan luas terdampak, kelas bahaya tanah longsor di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan hampir seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya tanah longsor.

Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya tanah longsor di Provinsi DIY adalah 44.458 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

**h. Gempabumi**

Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempabumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktivitas sesar dipermukaan bumi, atau pergerakan geomorfologi secara lokal. Skala yang digunakan untuk menentukan besarnya gempabumi biasanya dengan *Skala Richter (SR)*. Intensitas atau getarannya diukur dengan skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*).

Kejadian bencana gempabumi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya gempabumi adalah klasifikasi topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya gempabumi untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.9 tentang Potensi luas Gempa Bumi di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	58.627	Sedang
2	Bantul	49.047	Tinggi
3	Gunungkidul	122.088	Sedang
4	Sleman	54.454	Tinggi
5	Yogyakarta	3.250	Tinggi
Yogyakarta		<b>287.466</b>	Tinggi

**Tabel 3.9 : Tentang Potensi luas Gempa Bumi di wilayah DIY**

**Tabel 3.10** memperlihatkan luas terdampak dan kelas bahaya gempabumi di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya gempabumi. Berdasarkan

pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya gempa bumi di Provinsi DIY adalah 313.315 Ha dengan kelas bahaya tinggi

**i. Tsunami**

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 100 km dan magnitudo lebih dari 7 SR. Di Indonesia gempa bumi tektonik yang terjadi di laut tersebut lokasinya dekat dengan pantai sekitar 200 mengakibatkan tsunami lebih cepat datang mencapai pantai (tsunami lokal). Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut.

Kejadian bencana tsunami dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya tsunami adalah ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng dan kekasaran permukaan

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya tsunami untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.10 tentang Potensi luas Tsunami di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	4.262	Tinggi
2	Bantul	2.591	Tinggi
3	Gunungkidul	669	Tinggi
Yogyakarta		<b>7.522</b>	Tinggi

**Tabel 3.10 : Tentang Potensi luas Tsunami di wilayah DIY**

**Tabel 3.10** memperlihatkan luas terdampak dan kelas bahaya tsunami di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan tiga kabupaten/kota yang terpapar bahaya tsunami. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya tsunami di Provinsi DIY adalah 7.522 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

j. **Epidemi dan Wabah Penyakit**

Epidemi, wabah penyakit, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemio atau wabah dan KLB merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa. Ada 4 (empat) jenis penyakit yang digunakan untuk menentukan ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit yaitu: penyakit HIV/AIDS, Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan Penyakit Campak.

Kejadian bencana epidemi dan wabah penyakit dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana dan. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya epidemi dan wabah penyakit adalah sebagai berikut :

1. Kepadatan penduduk penderita malaria
2. Kepadatan penduduk penderita demam berdarah
3. Kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS
4. Kepadatan penduduk penderita campak
5. Kepadatan penduduk

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.11 tentang Potensi luas Epidemi dan Wabah Penyakit di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	3.549	Rendah
2	Bantul	3.597	Rendah
3	Gunungkidul	9.471	Rendah
4	Sleman	3.673	Rendah
5	Yogyakarta	27	Rendah
Yogyakarta		<b>20.317</b>	Rendah

**Tabel 3.11 : Potensi luas Epidemi dan Wabah Penyakit di wilayah DIY**

**Tabel 3.11** memperlihatkan luas terdampak dan kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya epidemi dan wabah penyakit. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DIY adalah 20.317 Ha dengan kelas bahaya rendah.

**k. Kegagalan Teknologi**

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Kejadian bencana kegagalan teknologi dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya kegagalan teknologi adalah kapasitas industri dan jenis industri; manufaktur (logam) dan kimia.

Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya kegagalan teknologi untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.12 tentang Potensi luas kegagalan teknologi di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	513	Tinggi
2	Bantul	437	Tinggi
3	Sleman	758	Tinggi
4	Yogyakarta	193	Tinggi
Yogyakarta		<b>1.901</b>	Tinggi

**Tabel 3.12 : Tentang Potensi luas kegagalan teknologi di wilayah DIY**

**Tabel 3.12** memperlihatkan luas terdampak dan kelas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya kegagalan

teknologi. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi DIY adalah 1.901 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

**I. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), Api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar.

Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana.

Parameter yang dilihat untuk menghitung indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Berdasarkan parameter tersebut maka diperoleh hasil kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan untuk Provinsi DIY seperti terlihat pada **tabel 3.13 tentang Potensi luas Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah DIY.**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kulonprogo	53	Tinggi
2	Bantul	436	Sedang
3	Gunung Kidul	10.784	Sedang
4	Sleman	1.484	Sedang
Yogyakarta		<b>12.757</b>	Tinggi

**Tabel 3.13 : Potensi luas Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah DIY**

**Tabel 3.13** memperlihatkan luas terdampak dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi DIY. Hasil pengkajian bahaya yang dilakukan memperlihatkan seluruh kabupaten/kota yang terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pengkajian tersebut, diketahui total luas

bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi DIY adalah 12.757 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

## 2. Kerentanan

Indeks penyusun kerentanan terdiri dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar diperoleh dari komponen sosial budaya. Sedangkan indeks kerugian diperoleh dari komponen fisik, ekonomi dan lingkungan. Komponen sosial budaya ditentukan berdasarkan parameter kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan (*sex ratio*, kelompok umur rentan, penduduk miskin dan penduduk cacat).

Sementara itu, indeks kerugian dikelompokkan dalam dua indeks yaitu kerugian rupiah (fisik dan ekonomi) dan kerusakan lingkungan. Dimana komponen fisik diperoleh berdasarkan parameter rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis yang berpotensi terdampak bencana, komponen ekonomi berdasarkan parameter lahan produktif dan PDRB. Sedangkan komponen lingkungan diperoleh berdasarkan parameter penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau/*mangrove*, rawa, dan semak belukar).

Parameter untuk komponen ekonomi hampir sama untuk seluruh potensi bencana. Komponen fisik hampir sama untuk seluruh bencana kecuali untuk bencana kekeringan, karena bencana kekeringan tidak merusak infrastruktur maupun bangunan. Sedangkan komponen lingkungan berbeda-beda untuk masing-masing jenis ancaman bencana dan diperoleh dari rata-rata bobot jenis tutupan lahan, namun untuk bencana gempa bumi dan cuaca ekstrem tidak memiliki parameter lingkungan, hal tersebut dikarenakan bencana gempa bumi dan cuaca ekstrem tidak merusak fungsi lahan maupun lingkungan.

Khusus bencana epidemi dan wabah penyakit tidak memiliki dampak kerugian (ekonomi, fisik dan lingkungan), karena bencana ini tidak berpengaruh pada lahan produktif, bangunan/infrastruktur maupun lahan/lingkungan. Sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak mempunyai komponen sosial dan fisik, karena

wilayah bahayanya di luar wilayah pemukiman. Sumber informasi utama yang digunakan untuk analisis kerentanan pada kajian risiko bencana Provinsi DIY berbeda-beda tiap komponennya, yaitu:

1. Komponen sosial budaya dengan sumber data dari Kemendagri tahun 2010 yang diproyeksikan ke tahun 2015.
2. Komponen ekonomi dengan sumber data data dari Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014.
3. Komponen fisik dengan sumber data Podes untuk data jumlah rumah dan fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan kesehatan), dan untuk parameter jumlah fasilitas kritis bersumber dari BIG (Badan Informasi Geospasial).
4. Komponen lingkungan dengan sumber data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kajian kerentanan dilakukan untuk melihat potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian akibat bencana. Untuk melihat rekapitulasi potensi penduduk terpapar untuk seluruh bencana yang berpotensi di Provinsi DIY, dapat dilihat pada **tabel 3.14**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. BANJIR	2.964.112	479.815	711.176	15.991	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	38.105	6.498	11.397	206	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	3.527.409	584.685	904.225	20.404	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	400.776	68.405	109.905	1.918	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	4.041	728	1.330	39	TINGGI
6. GEMPABUMI	3.678.677	613.121	957.148	21.692	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	-	-	-	-
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	62.206	9.392	12.406	193	TINGGI
9. KEKERINGAN	3.677.245	612.866	956.715	21.687	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	54.258	8.180	9.059	276	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	166.384	30.729	56.023	1.403	TINGGI
12. TSUNAMI	48.271	8.687	15.654	484	TINGGI

**Tabel 3.14** : Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

Dari **tabel 3.14** terlihat dominan kelas penduduk terpapar adalah **tinggi**, berbagai upaya diperlukan untuk meminimalisir potensi penduduk terpapar di kawasan Provinsi DIY. Sementara itu, potensi kerugian seluruh potensi bencana dapat dilihat pada **tabel 3.15**

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. BANJIR	2.520	1.192	3.712	TINGGI	144	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	129	35	165	TINGGI	31	SEDANG
3. CUACA EKSTRIM	13.017	3.278	16.295	TINGGI	-	-
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	-	-	-	-	-	-
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	12	230	242	TINGGI	8	SEDANG
6. GEMPABUMI	11.102	2.475	13.576	TINGGI	-	-
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	410	410	SEDANG	372	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	276	-	-	SEDANG	-	-
9. KEKERINGAN	-	3.412	3.412	SEDANG	456	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	118	1	118	TINGGI	456	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	817	716	1.533	TINGGI	742	TINGGI
12. TSUNAMI	90	1.485	1.575	TINGGI	-	RENDAH

**Tabel 3.15.** Potensi Kerugian Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.15** menunjukkan kelas dominan potensi kerugian fisik dan ekonomi adalah **tinggi** dan kelas dominan potensi kerusakan lingkungan adalah **tinggi**. Penggabungan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian menentukan kelas kerentanan untuk setiap potensi bencana di Provinsi DIY. kelas kerentanan seluruh bencana tersebut terlihat pada **tabel 3.16**

JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAKAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
6. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	SEDANG	-	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
12. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

**Tabel 3.16** Kelas Kerentanan Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

Indeks kerentanan berdasarkan **tabel 3.17** merupakan dasar penentuan kelas kerentanan bencana di Provinsi DIY. Pengkajian kelas kerentanan meliputi 12 potensi bencana di Provinsi DIY yang berada pada kelas kerentanan sedang dan tinggi. Kelas kerentanan sedang terdapat pada bencana banjir. Kelas kerentanan tinggi terdapat pada bencana selebihnya.

Kajian kerentanan per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Banjir

Pengkajian kerentanan untuk bencana banjir di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana banjir per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.17** dan **tabel 3.18**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	274.209	52.847	98.496	2.168	TINGGI
2. BANTUL	838.334	139.683	240.812	4.495	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	339.644	67.250	132.898	2.989	TINGGI
4. SLEMAN	1.101.430	166.097	183.907	5.032	TINGGI
5. YOGYAKARTA	410.495	53.938	55.063	1.307	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>2.964.112</b>	<b>479.815</b>	<b>711.176</b>	<b>15.991</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.17** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.17** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana banjir di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana banjir dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana banjir di Provinsi DIY adalah **2.964.112** juta jiwa.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	375	859	1.234	TINGGI	22	SEDANG
2. BANTUL	923	186	1.109	SEDANG	32	SEDANG
3. GUNUNGKIDUL	42	37	78	TINGGI	28	RENDAH
4. SLEMAN	346	110	456	TINGGI	34	SEDANG
5. YOGYAKARTA	833	-	833	SEDANG	28	SEDANG
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>2.520</b>	<b>1.192</b>	<b>3.712</b>	<b>TINGGI</b>	<b>144</b>	<b>SEDANG</b>

**Tabel 3.18** Potensi Kerugian Bencana Banjir di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.18** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Yogyakarta jumlah kerugian total sebesar **3,712 triliun rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana banjir di Provinsi Yogyakarta adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan

lingkungan untuk bencana banjir adalah sebesar **144 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **sedang**.

**b. Banjir Bandang**

Pengkajian kerentanan untuk bencana banjir bandang di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana banjir bandang per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.19** dan **tabel 3.20**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	3.576	691	1.281	33	TINGGI
2. BANTUL	32.688	5.441	9.395	165	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	1.841	366	721	8	SEDANG
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>38.105</b>	<b>6.498</b>	<b>11.397</b>	<b>206</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.19** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.19** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana banjir bandang di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana banjir bandang dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana banjir bandang di Provinsi DIY adalah **38.105** jiwa.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	13	0	14	SEDANG	-	RENDAH
2. BANTUL	108	17	124	TINGGI	15	SEDANG
3. GUNUNGKIDUL	8	18	27	TINGGI	16	SEDANG
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>129</b>	<b>35</b>	<b>165</b>	<b>TINGGI</b>	<b>31</b>	<b>SEDANG</b>

**Tabel 3.20.** Potensi Kerugian Bencana Banjir Bandang di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.20** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana banjir bandang dengan

total sebesar **165 milyar rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana banjir bandang di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana banjir bandang adalah sebesar **31 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **sedang**

c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Pengkajian kerentanan untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.21** dan **tabel 3.22**

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	1.238	238	445	11	SEDANG
2. BANTUL	2.049	341	588	21	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	754	149	297	7	SEDANG
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>4.041</b>	<b>728</b>	<b>1.330</b>	<b>39</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.21.** Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan tabel 3.22 dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DIY adalah **4.041** jiwa.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)			KELAS	POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	4	153	157	TINGGI	8	SEDANG
2. BANTUL	6	27	33	RENDAH	-	-
3. GUNUNGKIDUL	2	49	52	SEDANG	-	-
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>12</b>	<b>230</b>	<b>242</b>	<b>TINGGI</b>	<b>8</b>	<b>SEDANG</b>

**Tabel 3.22.** Potensi Kerugian Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi D. I Yogyakarta

**Tabel 3.23** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan total sebesar **242 milyar rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar **8 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **sedang**.

d. Kekeringan

Pengkajian kerentanan untuk bencana kekeringan di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana kekeringan per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.23** dan **tabel 3.24**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	411.820	79.364	147.918	3.463	TINGGI
2. BANTUL	971.422	161.858	279.037	5.381	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	714.505	141.462	279.576	6.098	TINGGI
4. SLEMAN	1.166.848	175.961	194.832	5.415	TINGGI
5. YOGYAKARTA	412.650	54.221	55.352	1.330	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>3.677.245</b>	<b>612.866</b>	<b>956.715</b>	<b>21.687</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.23.** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.23** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana kekeringan di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana kekeringan dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana kekeringan di Provinsi DIY adalah **3.677.245 jiwa**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	-	895	895	SEDANG	8	SEDANG
2. BANTUL	-	317	317	RENDAH	105	SEDANG
3. GUNUNGKIDUL	-	1.999	1.999	SEDANG	115	SEDANG
4. SLEMAN	-	201	201	RENDAH	228	TINGGI
5. YOGYAKARTA	-	-	-	RENDAH	-	RENDAH
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	-	<b>3.412</b>	<b>3.412</b>	<b>SEDANG</b>	<b>456</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.24** Potensi Kerugian Bencana Kekeringan di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.24** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana kekeringan dengan total sebesar **3,412 triliun rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana kekeringan di Provinsi DIY adalah **sedang**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana kekeringan adalah sebesar **456 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **tinggi**.

e. Letusan Gunungapi

Pengkajian kerentanan untuk bencana letusan gunungapi di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Sama halnya dengan pengkajian bahaya, pengkajian kerentanan bencana gunungapi dilakukan terhadap Gunungapi Sleman di Provinsi DIY. Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana letusan gunungapi per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.25** dan **tabel 3.26**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
SLEMAN	54.258	8.180	9.059	276	TINGGI
DI. YOGYAKARTA	54.258	8.180	9.059	276	TINGGI

**Tabel 3.25** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Letusan Gunungapi Sleman Di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.25** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana letusan Gunungapi Sleman di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana letusan Gunungapi Sleman dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana letusan Gunungapi Sleman di Provinsi DIY adalah **54.258 jiwa**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
SLEMAN	118	1	118	TINGGI	456	TINGGI
DI. YOGYAKARTA	118	1	118	TINGGI	456	TINGGI

**Tabel 3.26.** Potensi Kerugian Bencana Letusan Gunungapi Sleman di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.26** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana letusan gunungapi dengan total sebesar **118 milyar rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana letusan gunungapi di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana letusan gunungapi adalah sebesar **454 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **tinggi**.

f. Cuaca Ekstrim

Pengkajian kerentanan untuk bencana cuaca ekstrim di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana cuaca ekstrim per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.27** dan **tabel 3.28**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	411.970	79.393	147.973	3.463	TINGGI
2. BANTUL	951.851	158.598	273.414	5.206	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	602.402	119.272	235.712	5.115	TINGGI
4. SLEMAN	1.148.536	173.201	191.774	5.290	TINGGI
5. YOGYAKARTA	412.650	54.221	55.352	1.330	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>3.527.409</b>	<b>584.685</b>	<b>904.225</b>	<b>20.404</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.27** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.27** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim di Provinsi DIY adalah **3.527.409 jiwa**

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)			KELAS	POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN		LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	1.293	1.166	2.459	TINGGI	-	-
2. BANTUL	2.502	304	2.806	TINGGI	-	-
3. GUNUNGKIDUL	1.899	1.625	3.524	TINGGI	-	-
4. SLEMAN	6.007	182	6.189	SEDANG	-	-
5. YOGYAKARTA	1.316	-	1.316	SEDANG	-	-
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>13.017</b>	<b>3.278</b>	<b>16.295</b>	<b>TINGGI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.28.** Potensi Kerugian Bencana Cuaca Ekstrim Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.28** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana cuaca ekstrim dengan total sebesar **16,295 triliun rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana cuaca ekstrim di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk kerusakan lingkungan untuk bencana cuaca ekstrim tidak ada, karena belum ada metodologi untuk perhitungannya. Selain itu, bencana cuaca ekstrim tidak mengubah fungsi lingkungan/lahan.

g. Tanah Longsor

Pengkajian kerentanan untuk bencana tanah longsor di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana tanah longsor per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.29** dan **tabel 3.30**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	57.743	11.123	20.740	593	TINGGI
2. BANTUL	39.428	6.567	11.324	239	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	55.302	10.943	21.637	476	TINGGI
4. SLEMAN	13.911	2.096	2.322	95	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>166.384</b>	<b>30.729</b>	<b>56.023</b>	<b>1.403</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.29** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.29** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana tanah longsor di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana tanah longsor dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana tanah longsor di Provinsi DIY adalah **166.384 jiwa**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	380	261	641	TINGGI	65	TINGGI
2. BANTUL	124	102	227	TINGGI	72	SEDANG
3. GUNUNGKIDUL	262	299	561	TINGGI	173	TINGGI
4. SLEMAN	50	54	104	TINGGI	433	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>817</b>	<b>716</b>	<b>1.533</b>	<b>TINGGI</b>	<b>742</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.30** Potensi Kerugian Bencana Tanah Longsor di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.30** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana tanah longsor dengan total sebesar **1,533 triliun rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana tanah longsor di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana tanah longsor adalah sebesar **742 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **tinggi**.

**h. Gempabumi**

Pengkajian kerentanan untuk bencana gempabumi di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana gempabumi per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.31** dan **tabel 3.32**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	412.098	79.418	148.019	3.465	TINGGI
2. BANTUL	971.422	161.857	279.038	5.382	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	715.125	141.585	279.818	6.098	TINGGI
4. SLEMAN	1.167.382	176.040	194.921	5.417	TINGGI
5. YOGYAKARTA	412.650	54.221	55.352	1.330	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>3.678.677</b>	<b>613.121</b>	<b>957.148</b>	<b>21.692</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.31.** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.31** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana gempabumi di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana gempabumi dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana gemabumi di Provinsi DIY adalah **3.678.677 jiwa**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	517	976	1.493	TINGGI	-	-
2. BANTUL	3.005	437	3.441	TINGGI	-	-
3. GUNUNGKIDUL	926	913	1.839	TINGGI	-	-
4. SLEMAN	5.119	149	5.268	SEDANG	-	-
5. YOGYAKARTA	1.535	-	1.535	SEDANG	-	-
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>11.102</b>	<b>2.475</b>	<b>13.576</b>	<b>TINGGI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.32.** Potensi Kerugian Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.32** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana gempa bumi dengan total sebesar **13,576 triliun rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana gempa bumi di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana gempa bumi tidak ada, karena belum ada metodologi untuk perhitungannya. Selain itu, bencana gempa bumi tidak mengubah fungsi lingkungan/lahan.

**i. Tsunami**

Pengkajian kerentanan untuk bencana tsunami di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana tsunami per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.33** dan **tabel 3.34**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	24.033	4.630	8.631	226	TINGGI
2. BANTUL	23.640	3.938	6.791	253	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	598	119	232	5	SEDANG
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>48.271</b>	<b>8.687</b>	<b>15.654</b>	<b>484</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.33.** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.33** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana tsunami di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana tsunami dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana tsunami di Provinsi DIY adalah **48.271 jiwa**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	44	1.160	1.204	TINGGI	-	-
2. BANTUL	44	290	334	TINGGI	-	-
3. GUNUNGKIDUL	2	35	37	SEDANG	-	-
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>90</b>	<b>1.485</b>	<b>1.575</b>	<b>TINGGI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.34.** Potensi Kerugian Bencana Tsunami Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 38** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana tsunami dengan total sebesar **1,575 triliun rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana tsunami di Provinsi DIY adalah **tinggi**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana tsunami tidak ada karena tidak ada karena tidak terdapat lingkungan atau lahan produktif.

**j.** Epidemologi dan Wabah Penyakit

Pengkajian kerentanan untuk bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana epidemi dan wabah penyakit per kabupaten/kota di Provinsi DIY terlihat pada **tabel 3.35**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	44.814	8.639	16.098	264	TINGGI
2. BANTUL	118.505	19.746	34.044	567	TINGGI
3. GUNUNGKIDUL	89.977	17.817	35.207	630	TINGGI
4. SLEMAN	145.297	21.915	24.263	450	TINGGI
5. YOGYAKARTA	2.183	288	293	7	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>400.776</b>	<b>68.405</b>	<b>109.905</b>	<b>1.918</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.35.** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.35** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana epidemi dan wabah penyakit dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi DIY adalah **400.776 jiwa**.

k. Kegagalan Teknologi

Pengkajian kerentanan untuk bencana kegagalan teknologi di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar bencana, kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang dihasilkan (baik indeks penduduk terpapar maupun indeks kerugian). Potensi penduduk terpapar dan kerugian yang ditimbulkan bencana kegagalan teknologi per kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.36** dan **tabel 3.37**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI PENDUDUK TERPAKAR (JIWA)				KELAS
	JUMLAH PENDUDUK TERPAKAR	KELOMPOK RENTAN			
		KELOMPOK UMUR RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
1. KULONPROGO	6.844	1.319	2.458	80	TINGGI
2. BANTUL	12.500	2.082	3.591	30	TINGGI
3. SLEMAN	18.445	2.781	3.082	42	TINGGI
4. YOGYAKARTA	24.417	3.210	3.275	41	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>62.206</b>	<b>9.392</b>	<b>12.406</b>	<b>193</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.36.** Potensi Penduduk Terpapar Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.36** dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana kegagalan teknologi di Provinsi DIY berada pada kelas **tinggi**. Hal tersebut diperoleh berdasarkan penggabungan kepadatan penduduk terpapar bencana kegagalan teknologi dengan penduduk kelompok rentan. Total jumlah penduduk terpapar bencana kegagalan teknologi di Provinsi DIY adalah **62.206 jiwa**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	42	-	42	SEDANG	-	-
2. BANTUL	49	-	49	SEDANG	-	-
3. SLEMAN	86	-	86	SEDANG	-	-
4. YOGYAKARTA	98	-	98	SEDANG	-	-
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>276</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>SEDANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 3.37.** Potensi Kerugian Bencana Kegagalan Teknologi di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.37** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana kegagalan teknologi dengan total sebesar **276 milyar rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara

keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana kegagalan teknologi di Provinsi DIY adalah **sedang**. Untuk bencana kegagalan teknologi di Provinsi DIY tidak memiliki potensi ekonomi dan kerusakan lingkungan, karena tidak berada di lingkungan atau lahan produktif.

1. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengkajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi DIY bertujuan untuk mengetahui potensi kerugian yang timbul akibat bencana (baik dalam rupiah maupun hektar lingkungan) serta indeks yang indeks kerugian untuk bencana kebakaran hutan dan lahan., karena wilayah analisis yang dilakukan di luar wilayah pemukiman. Maka untuk bencana kebakaran hutan dan lahan tidak memiliki komponen sosial dan fisik. Untuk melihat rekapitulasi potensi kerugian dapat dilihat pada **tabel 3.38**.

KABUPATEN/KOTA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1. KULONPROGO	-	-	-	RENDAH	14	SEDANG
2. BANTUL	-	15	15	SEDANG	57	SEDANG
3. GUNUNGKIDUL	-	361	361	SEDANG	79	SEDANG
4. SLEMAN	-	34	34	SEDANG	222	TINGGI
<b>DI. YOGYAKARTA</b>	<b>-</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>SEDANG</b>	<b>372</b>	<b>TINGGI</b>

**Tabel 3.38.** Potensi Kerugian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.38** menjelaskan bahwa keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY memiliki jumlah kerugian untuk bencana kebakaran hutan dan lahan dengan total sebesar **410 milyar rupiah**. Hal ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kelas kerugian rupiah untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi DIY adalah **sedang**. Untuk jumlah kerusakan lingkungan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar **372 Ha** dengan kelas kerugian lingkungan adalah **tinggi**.

3. Kapasitas

Kapasitas (*capability*) merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siaga, menghadapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Aspek kapasitas ataupun kemampuan antara lain

kebijakan daerah, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pemetaan kerentanan dan kapasitas suatu daerah dalam penanggulangan bencana, maka dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam menghitung indeks kapasitas diukur dari aspek komponen kapasitas daerah, baik itu ditingkat pemerintahan maupun ditingkat masyarakat. Kapasitas daerah diperoleh berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Komponen kapasitas berfungsi untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Pengukuran pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini memiliki 5 (lima) prioritas dengan 22 indikator capaian. Prioritas program pengurangan risiko bencana dan indikator pencapaian yaitu :

- a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian:
  1. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan;
  2. Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan;
  3. Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal;
  4. Berfungsinya forum/Jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.
- b. Mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, **dengan indikator pencapaian:**
  1. Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah:

2. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama;
  3. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat;
  4. Kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.
- c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat, **dengan indikator pencapaian:**
1. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst);
  2. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan;
  3. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (*cost benefit analysis*) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset;
  4. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.
- d. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, **dengan indikator :**
1. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencanarencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
  2. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bencana;
  3. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi;

4. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (*enforcement of building codes*);
  5. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana;
  6. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyekproyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
- e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, **dengan indikator:**
1. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya;
  2. Tersedianya rencana kontingensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana;
  3. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pascabencana;
  4. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pascabencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah maka kita dapat membagi tingkat tersebut kedalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :

- **Level 1:** Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.
- **Level 2:** Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

- **Level 3:** Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
- **Level 4:** Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
- **Level 5:** Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

Dari prioritas-prioritas program pengurangan risiko bencana tersebut, maka diketahuilah ketahanan daerah Provinsi DIY dalam menghadapi potensi bencana yang ada. Adapun hasil kajian ketahanan daerah Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.39**

No	Prioritas	Total Nilai Prioritas	Indeks Prioritas
1	Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya	56,59	3
2	Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini	49,81	2
3	Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat	64,17	3
4	Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar	69,07	4
5	Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat	65,11	3
<b>Total Nilai Prioritas</b>		<b>60,95</b>	
<b>Indeks Ketahanan Daerah</b>		<b>3</b>	

**Tabel 3.39** Hasil Kajian Ketahanan Daerah Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 3.39**, menggambarkan bahwa secara umum ketahanan daerah Provinsi DIY dalam menghadapi bencana yang berpotensi berada pada **level 3**, dengan nilai prioritas yaitu **60,95**. Dari pencapaian tersebut dijelaskan bahwa daerah komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu

daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Provinsi DIY harus meningkatkan pencapaian ke level selanjutnya yaitu level 4 yang berarti dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

#### **H. Penilaian Risiko Bencana**

Penilaian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan dari suatu daerah yang kemudian menganalisa dan mengestimasi kemungkinan timbulnya potensi ancaman bencana. Selain itu, juga untuk mempelajari kelemahan dan celah dalam mekanisme perlindungan dan strategi adaptasi yang ada terhadap bencana, serta untuk memformulasikan rekomendasi realistis langkah-langkah mengatasi kelemahan dan mengurangi risiko bencana yang telah diidentifikasi.

Penilaian risiko adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Kajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas di Provinsi DIY sehingga menghasilkan tingkat bahaya seluruh bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas daerah. Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan kajian risiko bencana pada tahun 2011.

Pelaksanaan Penilaian risiko di dasarkan pada kajian risiko yang dibatasi hingga 5 (lima) tahun perencanaan. Oleh karena itu, kajian risiko yang dilakukan saat ini merupakan peninjauan ulang dan pengembangan dari kajian sebelumnya sehingga ada beberapa tambahan metodologi yang digunakan. Maka kajian risiko bencana ini masa perencanaan berlaku untuk tahun 2016 sampai 2020. Landasan atau dasar metodologi yang digunakan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di

kementerian/lembaga di tingkat nasional. Selain metodologi, identifikasi jenis bencana juga mengalami perubahan, dari 12 jenis potensi bencana yang sudah ditetapkan dalam KAK, bencana banjir bandang merupakan jenis bencana yang baru melakukan pengkajian risiko bencana.

a. Hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2011

Perubahan metodologi tersebut akan mempengaruhi pengkajian risiko bencana yang dilakukan, baik itu pengkajian bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana di Provinsi DIY. Rekapitulasi hasil kajian risiko bencana Provinsi DIY yang dilakukan pada tahun 2011 dapat dilihat pada **tabel 3.40**.

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO BENCANA
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
2. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
3. GEMPA BUMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
4. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
6. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
7. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
8. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
9. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI
11. KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

**Tabel 3.40.** Tingkat Risiko Bencana di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2011

**Tabel 3.40** menjelaskan bahwa tingkat risiko bencana daerah Provinsi DIY berdasarkan analisa yang tertuang kedalam Dokumen RPB tahun 2011 berada di level **tinggi**. Hal ini dikarenakan tingkat bahaya dan kerentanan daerah Provinsi DIY dominan berada pada level **tinggi**, sementara itu tingkat kapasitas daerah yang dimiliki berada pada level **rendah**.

b. Hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2015

Adapun hasil pengkajian risiko bencana untuk periode 2016-2020 baik dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas dan tingkat risiko akan dipaparkan dalam kajian berikut.

**1. Penentuan Tingkat Bahaya**

Penentuan tingkat bahaya diperoleh dari nilai indeks dominan untuk seluruh potensi bencana di Provinsi DIY. Untuk dapat melihat jenis tingkatan bahaya

setiap jenis potensi bencana dapat lebih jelas terlihat pada peta bahaya. Adapun rekapitulasi tingkat bahaya seluruh potensi bencana di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.41**.

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1. BANJIR	TINGGI
2. BANJIR BANDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	SEDANG
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG
6. GEMPABUMI	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	TINGGI
12. TSUNAMI	TINGGI

**Tabel 3.41.** Tingkat Bahaya di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 45**, disimpulkan bahwa jenis bencana yang ada di Provinsi DIY memiliki tingkat yang bervariasi. Hal ini dilihat dari luasan daerah dan pengelompokan nilai indeks dari potensi bahaya tersebut. Seperti halnya bencana banjir, banjir bandang, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan, letusan gunungapi, tanah longsor dan tsunami yang memiliki luas wilayah terdampak dengan kelas **tinggi**. Sedangkan untuk bencana cuaca ekstrim dan gelombang ekstrim dan abrasi memiliki luasan wilayah terdampak dengan kelas sedang. Bencana epidemi dan wabah penyakit memiliki luas wilayah terdampak rendah. Namun jika disimpulkan dominan luas terdampak untuk jenis bahaya tersebut memiliki indeks yang tergolong dalam tingkat bahaya **tinggi**.

## 2. Penentuan Tingkat Kerentanan

Penentuan tingkat kerentanan untuk setiap potensi bencana di Provinsi DIY diperoleh dari penggabungan indeks penduduk terpapar, indeks kerugian rupiah dan indeks kerusakan lingkungan. Adapun rekapitulasi analisa tingkat kerentanan seluruh bencana di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.42**.

JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1. BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTRIM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	TINGGI	-	-	TINGGI
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
6. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	SEDANG	-	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
12. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI

**Tabel 3.42.** Tingkat Kerentanan Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

Dari **tabel 46**, dapat disimpulkan secara umum tingkat kerentanan **sedang** untuk bencana banjir. Sedangkan bencana lainnya memiliki tingkat kerentanan **tinggi**. Hasil ini didapatkan dari perhitungan nilai indeks dengan ketentuan yang telah diatur dalam penentuan tingkat kerentanan.

### 3. Penentuan Tingkat Kapasitas

Penentuan tingkat kapasitas Provinsi DIY dalam menghadapi potensi bencana diperoleh dari indeks kapasitas daerah. Kapasitas daerah akan berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, hal ini disebabkan karena kapasitas daerah diperoleh dari kemampuan pemerintah Provinsi DIY. Rincian tingkat kapasitas dapat dilihat peta kapasitas Provinsi DIY. Adapun rekapitulasi hasil tingkat kapasitas seluruh bencana di Provinsi DIY dapat dilihat pada **tabel 3.43**.

JENIS BENCANA	TINGKAT KAPASITAS
1. BANJIR	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	SEDANG
3. CUACA EKSTRIM	SEDANG
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	SEDANG
5. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG
6. GEMPABUMI	SEDANG
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	SEDANG
9. KEKERINGAN	SEDANG
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	SEDANG
11. TANAH LONGSOR	SEDANG
12. TSUNAMI	SEDANG

**Tabel 3.43.** Tingkat Kapasitas Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.43**, diketahui bahwa kapasitas Provinsi DIY dalam menghadapi seluruh bahaya yang berpotensi berada pada tingkat **sedang**. Dimana tingkat kapasitas tersebut diperoleh dari ketahanan daerah berdasarkan Perka BNPB Nomor 03 tahun 2012. Untuk bencana dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Provinsi DIY perlu meningkatkannya guna untuk mengurangi dampak risiko yang akan timbul.

#### 4. Penentuan Tingkat Risiko

Penentuan tingkat risiko seluruh potensi bencana di Provinsi DIY didapatkan dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Berikut ini hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk seluruh potensi bencana di Provinsi DIY seperti yang terlihat pada **tabel 3.44**.

JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1. BANJIR	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2. BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
3. CUACA EKSTREM	SEDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI
4. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH
5. GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG
6. GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
8. KEGAGALAN TEKNOLOGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
9. KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
10. LETUSAN GUNUNGAPI MERAPI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
11. TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
12. TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

**Tabel 3.44.** Tingkat Risiko Bencana di Provinsi DI Yogyakarta

Berdasarkan **tabel 3.44**, diketahui bahwa Provinsi DIY memiliki tingkat risiko rendah untuk bencana epidemi dan wabah penyakit. Bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan memiliki tingkat risiko yang sedang. Sedangkan untuk bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, gempabumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor dan letusan gunungapi memiliki tingkat risiko tinggi.

Peninjauan ulang kajian risiko bencana di Provinsi DIY dilakukan untuk melihat perkembangan upaya pengurangan risiko bencana. Tinjauan ulang tersebut lebih difokuskan pada tingkat risiko untuk masing-masing bencana

yang berpotensi di Provinsi DIY. Adapun perkembangan risiko bencana yang berpotensi dari tahun 2011 hingga 2015 (**Tabel 3.41** dan **Tabel 3.44**) adalah semua bencana di Provinsi DIY mengalami penurunan risiko. Adapun bencana tersebut yaitu epidemi dan wabah penyakit, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **A. Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Visi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagai berikut:

#### **“Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka, Tanggap Dan Tangguh Terhadap Bencana dalam Menyongsong Peradaban Baru”**

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang **Peka** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang mudah menerima atau bereaksi terhadap pertanda-pertanda yang diberikan alam dan lingkungan terhadap hal apapun yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya bencana.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang **Tanggap** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang secara sungguh mendengar, mengetahui, mengerti apa yang didengar terhadap gejala-gejala alam yang timbul dan dengan segera melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar melalui intelektualitas yang tinggi, keahlian, kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang **Tangguh** dimaknai dengan masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, beradaptasi, dan mampu menyesuaikan diri dari segala macam ancaman yang berada di lingkungannya. Mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika bencana serta dengan cepat bisa membangun kehidupan menjadi normal kembali dan dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam

penanganan bencana, mampu merespon ancaman bencana dengan cepat dan tepat dan berkontribusi terhadap upaya penanggulangan bencana dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

**Menyongsong peradaban baru** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata sesama rakyat, antar warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi, dan halus serta adiluhung.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka, Tanggap Dan Tangguh Terhadap Bencana dalam Menyongsong Peradaban Baru”** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BPBD DIY dirumuskan sebagai berikut : **“Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”**

**B. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. **Tujuan** : Menurunnya resiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. **Sasaran** : Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana.

**Tabel 4.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan**

MISI	TUJUAN
Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.	Menurunnya resiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pencapaian tujuan menurunnya resiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dipantau melalui peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana.

Tujuan ialah pernyataan umum dari apa yang akan diselesaikan, sedangkan sasaran adalah pernyataan detail/jelas bagaimana mencapai tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

**Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD DIY**

No	Sasaran	Indikator	Keterangan	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Formulasi: Nilai indeks rata-rata tingkat ketahanan kabupaten/kota di wilayah DIY	Angka	n/a	n/a	50	55	60

### C. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 1. Kebijakan

Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta disusun atas regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana.

##### a. Regulasi

Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739;

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.;
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2013-2017
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;

## **2. Kelembagaan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD

merupakan Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. OPD ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan OPD, lembaga dan instansi terkait. Selain badan penanggulangan bencana pemerintah, di tingkat daerah telah dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB - Daerah Istimewa Yogyakarta), yakni sebuah forum independen yang beranggotakan para pihak dari semua unsur untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Yogyakarta dan Indonesia.

Forum PRB – Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan PRB di tingkat provinsi, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB Daerah Istimewa Yogyakarta dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan daerah terhadap bencana, selaras kesepakatan Global dalam Pengurangan Risiko Bencana yaitu Kerangka Sendai atau Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR). Kerangka Sendai terdiri dari 4 Prioritas dan 7 sasaran global yang telah di ratifikasi Indonesia menjadi 4 priorotas dan 4 tujuan nasional.

### **3. Strategi**

Untuk mencapai sasaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, strategi yang diambil antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD;
- b. Mewujudkan kesiapsiagaan dan respon yang efektif bencana baik saat pra bencana, darurat bencana, pasca bencana dan membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Merujuk pada visi dan misi yang telah ditetapkan, kebijakan dan strategi penanggulangan DIY yang difokuskan untuk menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas, mengingat problem utama atau *root of the problem* dalam penanggulangan bencana di Yogyakarta adalah masih relatif tingginya kerentanan dan masih relatif rendahnya kapasitas, maka penyelenggaraan penanggulangan PB diarahkan pada penurunan kerentanan (V) dan peningkatan kapasitas (C). Masing-masing elemen pokok-pokok strategi dalam manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD;
- b. Penguatan kelembagaan, regulasi kapasitas, perencanaan dan anggaran dalam penanggulangan bencana;
- c. Mengembangkan sistem komando tanggap darurat dalam mewujudkan ketersediaan logistik;
- d. Menggunakan fase pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik.

**Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi					
“Terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Peka, Tanggap Dan Tangguh Terhadap Bencana Menyongsong Peradaban Baru”					
Misi					
Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh;					
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Kebijakan</b>	
Menurunnya resiko bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta	Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana	1	Pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah serta penguatan kelembagaan a. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD	1	Ketercapaian Pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD;

		2	Mewujudkan kesiapsiagaan dan respon yang efektif bencana baik saat pra bencana, darurat bencana, pasca bencana dan membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik	2	Penguatan kelembagaan, regulasi, kapasitas, perencanaan, dan anggaran dalam penanggulangan bencana;
				3	Mengembangkan sistem komando tanggap darurat dan mewujudkan ketersediaan logistik;
				4	Menggunakan fase pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik

#### **D. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta dibatasi pada pelaku dan lingkup daerah. Kaidah ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **1. Keterlibatan**

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Peran dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah di tingkat daerah serta instansi vertikal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana termuat dalam pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 49 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

##### **a. Instansi Pemerintah**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkoordinasi, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di DIY

2. Biro Hukum mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan
3. Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
4. Biro Organisasi
5. Biro Administrasi Pembangunan
6. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
7. Biro Tata Pemerintahan
8. Badan Kepegawaian Daerah menyusun kebutuhan SDM aparatur Penanggulangan Bencana
9. BKPP Mendukung ketersediaan cadangan pangan dan distribusi kebutuhan pangan untuk tanggap darurat bencana
10. Badan Lingkungan Hidup Mengendalikan pencemaran limbah dan dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut, serta turut melakukan pengendalian tata ruang yang mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
11. Badan Diklat Melaksanakan pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana.
12. BLKPP Menyelenggarakan pelatihan TKM dan pembentukan kelompok usaha dalam upaya rekonstruksi pasca kejadian bencana.
13. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Mengelola arsip penanggulangan bencana.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang peka risiko bencana bersama dengan dinas-dinas terkait .
15. Dinas Sosial (Dinsos) merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban bencana.
16. Dinas Kesehatan (Dinkes) merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis.
17. RS Grashia Menangani kebutuhan penanganan psikososial korban bencana
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif serta menjalin kerjasama

dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana

19. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah yang terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana
20. Dinas PUP-ESDM merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi
21. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi, khususnya kebakaran hutan dan lahan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.
23. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi.
24. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan membangun dan mengembangkan lapangan kerja padat karya bagi masyarakat terdampak bencana.
25. Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait budaya.
26. Dinas Pariwisata Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait pariwisata.
27. Sat Pol PP Melakukan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah saat terjadi bencana, serta mendukung kesiapan relawan penanggulangan bencana.
28. Badan Kesbanglinmas Mendukung kesiapsiagaan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana

**b. Instansi Vertikal dan Instansi Terkait Lainnya**

1. BMKG DIY; membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika

2. Rumah Sakit Umum; Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait layanan kesehatan.
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI); Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap korban, lokasi dan kerusakan, pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
4. Kepolisian Republik Indonesia; Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, pemulihan keamanan dan ketertiban.
5. BASARNAS DIY; memberikan dukungan personil dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana; termasuk mendukung dalam mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan penca
6. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG); Membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
7. Badan Pusat Statistik (BPS); Membantu dalam bidang penyiapan data – data statistik.
8. Badan Pertanahan Nasional (BPN); Membantu dalam bidang penyiapan data – data pertanahan
9. PMI; memberikan bantuan medis pada kondisi darurat bencana.

## **2. Lingkup Daerah**

Lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif, maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang amat membutuhkan. Penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan daerah fokus Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota

untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu, penyusunan zona prioritas ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang terbatas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta disusun untuk 12 bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari provinsi. Bencana seperti pada tabel 4.4 tentang Potensi Bencana DIY adalah :

Tabel 4.4 tentang Potensi Bencana DIY

Potensi Bencana Di Provinsi Di Yogyakarta	
1. Banjir	7. Kebakaran hutan dan lahan
2. Banjir Bandang	8. Letusan Gunungapi
3. Gempabumi	9. Tsunami
4. Tanah Longsor	10. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5. Kekeringan	11. Kegagalan teknologi
6. Cuaca Ekstrim	12. Epidemii dan wabah penyakit

Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2015

Hasil Kajian Risiko Bencana tahun 2015, dari 12 potensi ancaman bencana di Daerah Istimewa Propinsi Yogyakarta dapat di kategorikan tingkat risiko yang kemudian ditetapkan bencana prioritas, seperti Tabel 4.5 tentang tingkat Risiko Potensi Bencana DIY.

BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN	MENURUN			GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI, EPIDEMII DAN WABAH PENYAKIT, KEBEKARAN HUTAN DAN LAHAN, KEGAGALAN TEKNOLOGI
	TETAP			GEMPABUMI, LETUSAN GUNUNG API, TSUNAMI
	MENINGKAT			CUACA EKSTRIM, BANJIR, KEKERINGAN, TANAH LONGSOR

Bencana Non Prioritas  
 Bencana Prioritas

Tabel 4.5 tentang tingkat Risiko Potensi Bencana DIY

Bencana prioritas dengan kecenderungannya tetap dengan tingkat risikonya tinggi adalah : Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami. Bencana prioritas dengan kecenderungannya meningkat dan tingkat risikonya tinggi adalah : Cuaca Ekstrim, Banjir, Kekeringan dan Tanah Longsor. Bencana prioritas dengan

kecenderungannya menurun dan tingkat risikonya tinggi adalah : Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, Kegagalan Teknologi, Kebakaran Gedung, Permukiman, Hutan Dan Lahan, Epidemii Dan Wabah Penyakit

Hasil kajian risiko tahun 2015 pada aspek kerentanan di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah di jelaskan dan di uraikan pada bab III di antaranya adalah potensi penduduk terpapar bencana di Provinsi DI Yogyakarta, potensi kerugian bencana dan kelas kerentanan bencana pada kategori tinggi. Merujuk pada Indeks Risiko Bencana Indonesia BNPB tahun 2013, tingkat Indeks Risiko multi ancaman Wilayah Yogyakarta (IRBI) berada pada no 14 di tingkat nasional, sedangkan peringkat untuk kota dan kabupaten detail bisa di gambarkan dalam tabel 4.6 tentang Indeks risiko Bencana DIY.

Tabel 4.6 : Indeks Risiko Bencana DIY (Multi Ancaman)

NO	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
48	Kulonprogo	D.I.Yogyakarta	203	Tinggi
82	Bantul	D.I.Yogyakarta	187	Tinggi
23 4	Gunungkidul	D.I.Yogyakarta	158	Tinggi
27 3	Sleman	D.I.Yogyakarta	154	Tinggi
40 7	Kota Yogyakarta	D.I.Yogyakarta	125	Sedang
14		D.I.Yogyakarta	165	Tinggi

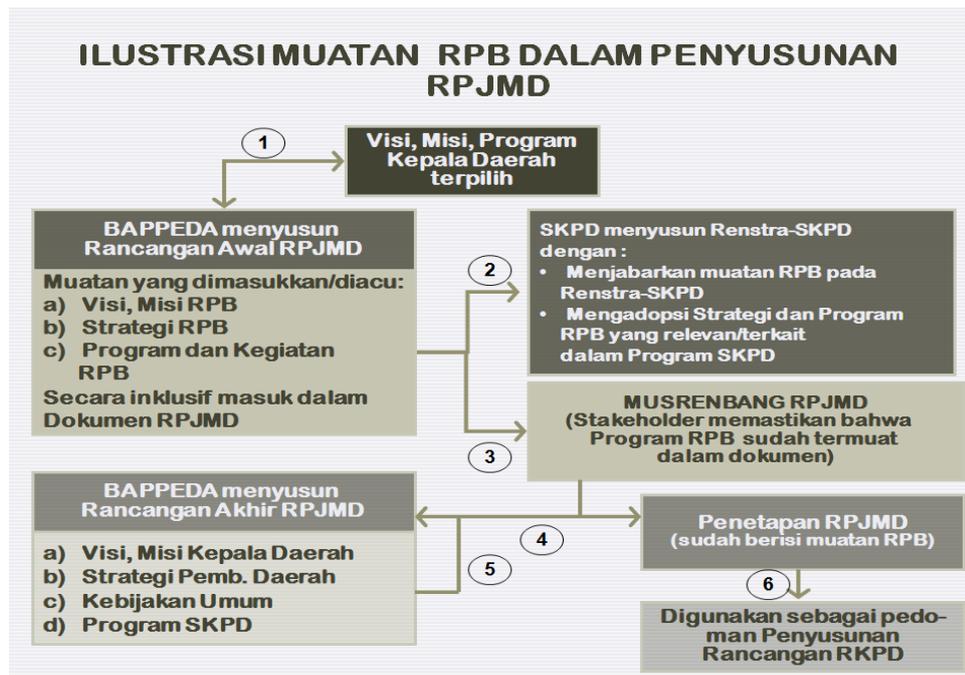
Sumber data : IRBI 2013

#### E. Integrasi RPB dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi RPB dengan Sietem Perencanaan Pembangunan daerah terdiri atas 2 fase yaitu sebelum penyusunan RPJMD dan setelah Penyusunan RPJMD:

##### 1. Fase Sebelum Penyusunan RPJMD

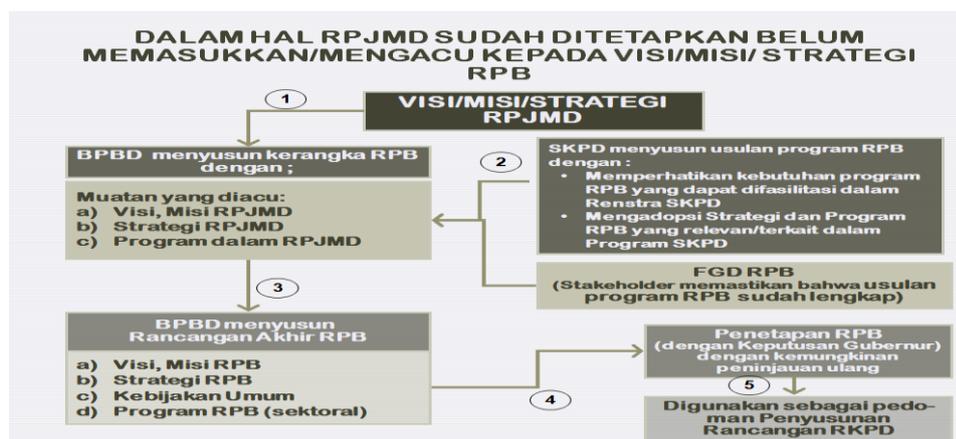
Integrasi RPB pada fase sebelum penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan visi, misi, dan program RPD dalam rancangan awal RPJMD. Muatan RPB juga diupayakan untuk dijabarkan dalam Reinstra SKPD sehingga secara inklusif RPBD terintegrasi dalam sistem Perencanaan Pembangunan daerah.



Gambar 4.1 : Fase RPB Sebelum Penyusunan RPJMD

## 2. Fase Setelah Penyusunan RPJMD

Sedangkan upaya yang diterapkan pada fase setelah penyusunan RPJMD dilakukan dengan menyusun RPB dengan mengacu pada muatan-muatan visi, misi dan program dalam RPJMD. Program-program RPB memuat program RPB yang relevan/terkait dalam program SKPD sehingga program RPB dapat difasilitasi dalam Reinstra SKPD. RPB selanjutnya digunakan sebagai penyusunan RPKPD.



Gambar 4.2 : Fase RPB Setelah Penyusunan RPJMD

Untuk lebih jelas tentang rencana advokasi untuk ketiga fase di atas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Integrasi RPB dengan Sistem Rencana Pembangunan Daerah

FASE INTEGRASI	HAL PERLU DILAKUKAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
Sebelum Penyusunan RPJMD	Pengintegrasian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan program-program PRB dalam Rancangan RPJMD	PRB menjadi salah satu sasaran, strategi, arah kebijakan atau program prioritas Pemda dalam RPJMD	BAPPEDA, BPBD, Pegiat PRB
Setelah Penyusunan RPJMD	1. <u>Integrasi pelaksanaan RPB di level teknokratis (Bappeda) dan level teknis (SKPD) secara berkesinambungan.</u>	<u>RPB digunakan sebagai dokumen sanding dalam penyusunan RKPD dan Renja-SKPD</u>	BAPPEDA, BPBD
	2. Monitoring intensif terhadap pelaksanaan RPB	Laporan monitoring tahunan keberhasilan, kendala dan pembelajaran serta rekomendasi pelaksanaan RPB pada institusi PB di Daerah	

Sumber : Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Melalui rencana integrasi ini diharapkan mampu menjamin keter selenggaraan kebijakan penanggulangan bencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB V**

### **STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Kebijakan penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 7 (tujuh) focus prioritas yang di jadikan dasar untuk kajian risiko bencana daerah, menentukan tingkat ketahanan daerah dan Indeks Risiko Bencana daerah. Rencana Penanggulangan Bencana di tingkat nasional dan daerah juga harus mampu menjawab 4 prioritas dalam dokumen Kerangka Aksi Sendai atau Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR) di antaranya adalah :

#### **1. Prioritas 1: Memahami Resiko Bencana**

Kebijakan dan praktek untuk manajemen risiko bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana di semua dimensi kerentanan, kapasitas, terpaan pada orang dan aset, karakteristik bahaya dan lingkungan. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko pra-bencana, untuk pencegahan dan mitigasi dan untuk pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang tepat serta respon yang efektif terhadap bencana.

#### **2. Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana.**

Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting demi menghasilkan manajemen risiko bencana yang efektif dan efisien. Visi, rencana, kompetensi, bimbingan dan koordinasi yang jelas didalam dan lintas sector, serta partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, diperlukan. Penguatan tata kelola risiko bencana untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi itu perlu dan mendorong kolaborasi dan kemitraan di seluruh mekanisme dan lembaga untuk pelaksanaan instrumen yang relevan dengan pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan.

#### **3. Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan**

Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural yang penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya orang, masyarakat, negara serta aset mereka, dan juga lingkungan. Ini dapat mendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah tersebut berbiaya

murah dan penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian dan memastikan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

**4. Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.**

Pertumbuhan risiko bencana yang stabil, termasuk peningkatan terpaan orang dan aset, dipadukan dengan pelajaran dari bencana masa lalu, menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat kesiapsiagaan untuk merespon, mengambil tindakan dalam peristiwa yang telah diprakirakan, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kesiapsiagaan respon dan memastikan tersedianya kapasitas untuk memastikan respon dan pemulihan efektif di semua level. Pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas dalam rangka membawa dan mempromosikan keadilan gender dan respon yang dapat diakses secara universal, pemulihan, rehabilitasi dan pendekatan rekonstruksi sangatlah penting. Bencana telah menunjukkan bahwa pemulihan, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang perlu disiapkan sebelum terjadi bencana, adalah kesempatan penting untuk “Membangun Kembali Lebih Baik”, begitu juga mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam langkah-langkah pembangunan, menjadikan negara dan masyarakat tahan terhadap bencana.

Praktik implementasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2018-2022 harus mengintegrasikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) yang telah ada. Sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. Pembelajaran dari daerah lain, masukan dari berbagai pemangku kepentingan juga sangat diperlukan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana lima tahun mendatang.

Sinkronisasi perencanaan pusat dan Propinsi dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 7 (tujuh) focus prioritas penanggulangan bencana, yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu

3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Focus prioritas penanggulangan bencana di jadikan dasar untuk menyusun kerangka strategi, program dan kegiatan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun mendatang.

#### A. Strategi, Program Dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan analisa risiko bencana dan kajian kebijakan penanggulangan bencana yang telah di uraian sebelumnya, penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam dokumen Rencana penanggulangan bencana di susun secara general dan spesifik jenis ancaman di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setrategi General Penanggulangan Bencana secara general selain di dasarkan pada kajian risiko yang sudah dilakukan juga di integrasikan analisis secara internal dan Eksternal untuk mendapatkan arahan alternative kebijakan, program dan juga anggaran kedepan. Hal tersebut dapat di lihat dalam Tabel 5.1 Tentang analisis strategis internal dan eksternal peluang dan tatangan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah.

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p><u>Peluang :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekspektasi DIY sebagai center of Excelllent PB</li> <li>2. 136 PT (18 Universitas) Di DIY</li> <li>3. Swasta dan Sektor Usaha yang peduli tentang bencana</li> <li>4. Lembaga Donor Internasional yang memiliki concern isue &amp; project di DIY</li> <li>5. Kebijakan alokasi dana desa</li> </ol>	<p><u>Tantangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetrasi modal &amp; praktik komersial dalam pemanfaatan ruang di DIY</li> <li>2. global warming &amp; perubahan iklim memicu peningkatan bencana hidrometeorologi</li> </ol>
--	--	---

<p><u>Kekuatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kohesi &amp; solidaritas masyarakat DIY masih tinggi</li> <li>2. Koordinasi lintas sektor &amp; lintas daerah masih cukup mudah dilakukan</li> <li>3. Soliditas Pegiat PB (Forum PRB)</li> <li>4. Banyak expert (pakar) PB di DIY</li> </ol>	<p><u>Alternatif Aksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkampanyekan &amp; membangun DIY sbg center of excellent PB</li> <li>2. Membentuk &amp; mengembangkan Forum PRB PT dan Sektor Privat yg terintegrasi dlm Forum PRB DIY</li> <li>3. Kolaborasi expert &amp; praktisi menyusun kajian dan database terpadu untuk PB &amp; PRB.</li> <li>4. Menyusun RPB &amp; RAD PRB sebagai konsensus multi-pihak dlm PB&amp;PRB</li> <li>5. Membentuk &amp; mengembangkan destana &amp; SSB secara kolaboratif</li> <li>6. Riset &amp; pengembangan instrumen pendukung PB &amp; PRB (EWS, dll)</li> </ol>	<p><u>Alternatif Aksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi Struktural pembangunan</li> <li>2. Integrasi perspektif API dan PRB dalam perencanaan pembangunan</li> <li>3. Penegakan hukum yang konsisten (law enforcement)</li> </ol>
<p><u>Kelemahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran &amp; pemahaman aparat &amp; masyarakat masih lemah dalam PRB</li> <li>2. Kebijakan daerah memperlemah PRB (ijin komersil, tata guna lahan, dll)</li> </ol>	<p><u>Alternatif Aksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi &amp; kampanye pentingnya PB &amp; PRB kolaboratif</li> <li>2. Review Kebijakan Daerah yg tdk berperspektif PRB</li> <li>3. Penyusunan Pedoman PU-PRB di level Desa/Kelurahan.</li> </ol>	<p><u>Alternatif Aksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi non-struktural (sosial) dalam pembangunan</li> <li>2. Pelaksanaan pendekatan partisipatoris dalam pembangunan</li> </ol>

Sedangkan strategi general penanggulangan bencana dapat di lihat pada tabel 5.2 dan 5.3.

Tabel 5.2 : Gambaran Strategi General penanggulangan Bencana Propinsi DIY

No	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah serta penguatan	Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD	Program Pencegahan Dini Bencana	Optimalisasi Pengelolaan PUSDALOPS PB Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan

	kelembagaan			Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
2	Mewujudkan kesiapsiagaan dan respon yang efektif bencana baik saat pra bencana, darurat bencana, pasca bencana dan membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik	Penguatan kelembagaan, regulasi, kapasitas, perencanaan, dan anggaran dalam penanggulangan bencana;	Program Pencegahan Dini Bencana	Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat Menghadapi Bencana
				Peningkatan Kapasitas Unsur Penanggulangan Bencana (PB)
		Mengembangkan sistem komando tanggap darurat dan mewujudkan ketersediaan logistik;	Program Penanggulangan Korban Bencana	Latihan dan Gladi Penanggulangan Bencana
				Penanganan Kedaruratan Bencana
				Koordinasi Manajemen Gudang Peralatan dan Logistik
				Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
		Menggunakan fase pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik	Program Pemulihan Pasca Bencana	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Pasca Bencana
				Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Pasca Bencana
Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana				
Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana				
				Terselenggaranya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana

Tabel 5.3 : Gambaran Strategi 7 focus prioritas penanggulangan bencana dapat merujuk pada 71 Indikator Ketahanan Daerah

<b>PRIORITAS</b>	<b>KERANGKA AKSI</b>
1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
	2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
	3. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
	4. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
	5. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
	6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
	7. Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD
	8. Optimalisasi Pencapaian Fungsi Forum PRB
	9. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	1. Pembaharuannya Peta Bahaya, Kerentanan, Kapasitas secara berkala dan di sesuaikan dengan sesuai dengan kebijakan yang ada
	2. Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah
	2. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya
	3. Komunikasi bencana lintas lembaga / instansi
	4. Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
	5. Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional
	6. Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB
	7. Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan
	8. Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
	9. Monitoring Ketersediaan dan Kesiapan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
	10. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan

	Daerah
	11. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
	12. Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk
	13. Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
	2. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana
	3. Penguatan 3 Pilar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana pada Daerah Berisiko
	4. Penguatan 4 Modul Safety Hospital pada Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana pada Daerah Berisiko
	5. Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
	2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
	3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
	4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
	5. Penegakan Hukum tentang Budidaya dan Konversi Lahan kawasan konservasi untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
	6. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
	7. Penguatan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
	8. Penegakan Hukum untuk pelanggaran penerapan IMB khususnya bangunan tahan gempa bumi
	9. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan Zona Peredam Gelombang Tsunami di Daerah Berisiko

	10. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir
	11. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Hasil Restorasi lahan konservasi di Daerah Berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan
	12. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS
Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	1. Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumberdaya untuk Penanganan Darurat 12 ancaman bencana di Yogyakarta berdasarkan Perencanaan Kontijensi
	2. Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana di Wilayah Yogyakarta
	3. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat 12 jenis ancaman bencana di Yogyakarta
	4. Penguatan standar Penetapan Status Darurat Bencana di Yogyakarta
	5. Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana
	6. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis
	7. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan status Darurat Bencana
	8. Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme dan standar kemanusiaan
	9. Penguatan penghentian Status Darurat Bencana
Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
	2. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
	3. Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
	4. Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru

Strategi spesifik penanggulangan bencana di wilayah propinsi Yogyakarta juga di susun berdasarkan peran para pihak untuk Penanggulangan Bencana yang telah di integrasikan dengan pencapaian empat prioritas kerangka Sendai (SFDRR) dapat di lihat pada tabel 5.4.

Tabel 5.4 : Gambaran Program penanggulangan bencana Propinsi DIY

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PIC
				PROSES	HASIL	
<b>PRIORITAS 1 : MEMAHAMI RISIKO BENCANA</b>						
1	Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional	Meningkatkan keterampilan PNS melalui pengikutsertaan dalam diklat PB	DIY	-Konsultasi penyelenggaraan diklat; - Menawarkan ke instansi yang terkait; -Pengiriman calon peserta diklat.	2 (dua) orang mengikuti diklat penanggulangan bencana	BKD
2	Penempatan pegawai pada instansi yang menangani PRB	Terpenuhiya kebutuhan pegawai di instansi yang menangani PRB	DIY	Menyesuaikan formasi yang kosong di instansi ybs	Terpenuhiya kebutuhan pegawai di instansi yang menangani PRB	BKD
3	Workshop penyusunan Hospital Disaster Plan	Rumah Sakit terbentuk kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana	DIY	Workshop	Terselenggaranya workshop dan terbentuknya Hospital Disaster Plan	Dinas Kesehatan
4	Pengembangan Public Safety Center	Masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan bila terjadi gawat darurat	4 kab, 1 kota	Advokasi	semua kab/kota memiliki public safety center	Dinas Kesehatan
5	Pembentukan SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana	Terbentuknya SOP	DIY	Workshop, ujicoba/ simulasi, pengesahan	SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan tersusun	
6	Menyusun HDP /Hospital	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya penyusunan dokumen	Dok HDP	Rumah Sakit Grhasia

	Dissaster Plan)			HDP		
7	Mempelajari Peta Rawan Bencana dan Peta Potensi Bencana	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya monitoring potensi bencana	Data Monitoring	Rumah Sakit Ghrasia
8	Mensupport data sesuai bidangnya kepada pemangku kepentingan	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya update data	Data Monitoring	Rumah Sakit Ghrasia
9	Survey Geologi/ Geofisika/ Geokimia	Memahami karakteristik vulkanisme G. Merapi	G. Merapi	4 kali survey	4 laporan dan data	BPPTKG
10	Optimalisasi Sistem Pemantauan G. Merapi	Mengetahui kondisi aktivitas terkini G. Merapi	G. Merapi	30 kali kegiatan optimalisasi	Data monitoring	BPPTKG
11	Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang ancaman bencana meteorologi dan geofisika	Peningkatan pemahaman warga sekolah terhadap risiko bencana meteorologis dan geofisika	3 atau 4 sekolah di DIY	Aktif datang ke sekolah-sekolah dan melaksanakan sosialisasi	Sosialisasi terlaksana	BMKG
12	Sekolah lapang iklim untuk petani	Peningkatan pemahaman warga sekolah terhadap risiko bencana meteorologis, termasuk adaptasi perubahan	DIY	Koordinasi dengan pemangku kepentingan bidang pertanian	Terlaksana	BMKG

		iklim				
13	Penyuluhan ketahanan finansial untuk keluarga dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan keluarga dalam menghadapi risiko bencana	DIY	terlaksananya penyuluhan dan workshop lewat kelompok2 usaha perempuan UMKM anggota Koperasi GEMI	nasabah Koperasi GEMI dan keluarga yang memahami dan mampu menerapkan materi penyuluhan	Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU)
14	Kajian analisis risiko bencana, khususnya risiko bencana hidrologi (banjir, kekeringan dan tanah longsor) dilakukan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), atau Harmonisasi Kajian yang sudah ada di DIY dan Jawa Tengah	Mengidentifikasi sumber ancaman dan risiko bencana hidrologi (sebagai baseline)	DAS Progo dan DAS Opak/Oyo, termasuk sub-sub DAS yang meliputi DIY dan Jawa Tengah	Perlu adanya kerjasama/ MoU antara Pemerintah DIY dan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kajian bersama	Teridentifikasinya sumber ancaman dan risiko bencana hidrologi di DAS dan Sum DAS Progo dan DAS Opak/Oyo	Yayasan Lestari
15	Sekolah Lingkar	Peningkatan kapasitas untuk masyarakat tanggap bencana	DIY	FGD, forum edukasi, dengan peserta dari kalangan masyarakat sipil, terlaksana 24 kali dalam 1 tahun	Peningkatan pemahaman terhadap pengurangan risiko bencana	Lingkar

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PIC
				PROSES	HASIL	
<b>PRIORITAS 2: Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Mengelola Risiko Bencana</b>						
1				Pengetahuan dan Pemahaman Petani peserta SLPHT meningkat pada 4 kabupaten	Peningkatan kapasitas pengelolaan	BPBD
2	Legislasi rancangan produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan 100%	DIY	Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	- Pergub: 70 - SK Gubernur: 200 - Instruksi Gubernur: 5	SETDA Prop
3	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan untuk Ketersediaan pangan yang memadai	4 kab	sosialisasi, pelatihan, gerakan optimalisasi potensi desa, informasi data peta ketahanan dan kerentanan pangan	menurunnya jumlah desa rawan pangan sebesar 4 desa dari tahun 2016 sebanyak 18 desa menjadi 14 desa pada tahun 2017	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
4	Penyusunan SOP Instalasi Gawat Darurat dalam penanganan bencana	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya penyusunan SOP IGD	Dok SOP IGD	Rumah Sakit Grhasia
5	Penyusunan SOP kegiatan lapangan dalam penanganan bencana	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Penyusunan SOP kegiatan lapangan dalam penanganan bencana	Dok SOP Lapangan	Rumah Sakit Grhasia

6	Sosialisasi Pengurangan resiko bencana dan Simulasi bencana	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan resiko bencana dan Simulasi bencana	2 kali simulasi/tahun	Rumah Sakit Ghrasia
7	Koordinasi penanganan GEPENG dan ANJAL	Peningkatan koordinasi dan penanganan GEPENG dan ANJAL	DIY	Koordinasi melalui rapat-rapat dan forum sosialisasi	Kegiatan terlaksana 1 tahun 2 kali	Satpol PP
8	Penanganan Demonstrasi	Pengurangan potensi konflik sosial	DIY	Pengamanan di lokasi	40 kali per tahun	Satpol PP
9	Patroli Tramtibmas/ Tramtibum	Peningkatan kesiapsiagaan, sekaligus pemberian rasa aman untuk publik	DIY	Patroli rutin	Rutin	Satpol PP
10	Kerjasama tramtib untuk wilayah perbatasan	Koordinasi perbatasan antar kab/kota dan antara DIY dengan Jawa Tengah	DIY/ Jateng	Koordinasi	Terlaksananya kesepahaman dan kerjasama	Satpol PP
11	Pengembangan suaka margasatwa	Meminimalisir dampak bencana terhadap margasatwa yang terancam	Kecamatan Paliyan (Gunung kidul), dan wilayah Sermo (Kulonpr	Identifikasi keanekaragaman margasatwa di lokasi, pengadaan sarana prasarana,	Terbentuknya suaka margasatwa di 2 lokasi	BKSD A

		punah	ogo)	dan pelaksanaan		
12	Table Top Exercise gempa bumi-tsunami	Peningkatan kapasitas komando dan koordinasi dalam penanganan bencana tsunami	DIY	Melibatkan stakeholders segaris dengan perencanaan kontinjensi gempa bumi-tsunami	Peningkatan kapasitas komando dan koordinatif para stakeholder	BMKG
13	Tentara Manunggal Membangun Desa	Kegiatan TNI untuk memperkuat ketahanan masyarakat, termasuk menghadapi bencana	DIY	-TMMD Reguler di 4 desa selama 30 hari;  -TMMD Sengkuyung 2 operasi, selama 21 hari per operasi	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	Korem 072 Pamungkas
14	Koordinasi penghijauan wilayah pesisir dengan Pemda	Peningkatan penghijauan wilayah pesisir	DIY	Koordinasi	Penataan dan pembagian kerja penghijauan	TNI Angkatan Laut LANAL DIY

15	Penguatan kelembagaan untuk bidang maal Koperasi GEMI dan bidang PB YP2SU	Peningkatan kapasitas, serta pemrograman untuk penggalian, pengelolaan, dan pengalokasian dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) untuk PRB	DIY	penggalian dana ZISWAF senilai 1 milyar rupiah, pengalokasian, dan pelaksanaan program PRB	alokasi untuk dana ZISWAF untuk PRB sekitar 1 milyar rupiah	Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU)
16	Pendampingan regulasi dan kebijakan PB Daerah	terlembaganya PRB di daerah, terutama tingkat provinsi dan kabupaten/kota	DIY, dan seluruh Indonesia	Perumusan produk hukum daerah dan kajian-kajian kebijakan strategis daerah untuk PRB	Disahkannya produk hukum daerah dan termanfaatkannya kajian kebijakan strategis PRB dalam regulasi, kebijakan, kelembagaan, dan anggaran daerah provinsi, kab/kota	Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU)
17	Peningkatan kapasitas SKPD/Akademi selain BPBD terkait konsep PRB, Terutama para konseptor program. <i>(Catatan: sebagai gambaran, pengalaman berinteraksi dengan SKPD minim sekali</i>	Program-program sektor ekonomi, sosial dan lingkungan berprespektif PRB,		Pelatihan/Sosialisasi Konsep PRB kepada Staf SKPD bagian program dan Akademisi yg biasa jadi konsultan untuk program-program ekonomi, sosial dan		Yayasan Lestari

	<i>pengetahuan mereka terhadap konsep PRB)</i>			Lingkungan.		
18	Sekolah Madrasah Aman Bencana	Peningkatan ketangguhan sekolah dan madrasah terhadap bencana	4 sekolah/madrasah tiap tahun	Penyusunan modul kebencanaan, dengan lokasi: 4 sekolah/madrasah tahun 2017, 4 sekolah madrasah tahun 2018, dan 4 sekolah/madrasah tahun 2019	Tersusunnya modul kebencanaan secara partisipatif	Lingkar
19	Pendampingan sekolah inklusi	Pembentukan sister school, mempersiapkan sekolah umum untuk menerima murid penyandang disabilitas dalam hal terjadinya pengungsian akibat bencana.	1 sekolah (2017), 1 sekolah (2018), 1 sekolah (2019)	Pembentukan sister school, kerjasama dengan Yaketunis	Kerjasama dengan sekolah dampingan Yaketunis untuk bencana	Lingkar
20	Advokasi Tambang Pasir Merapi	Peningkatan ketahanan dan awareness, serta pengaturan tambang pasir Merapi	DIY	Advokasi struktural	Tambang yang berkeadilan	WALHI
21	Penguatan	Peningkatan kapasitas	Di sekolah/P	Pelatihan dan	Terkuatkannya PMR di	PMI

	PMR sekolah	PMR sekolah dan KSR Perguruan tinggi dalam melaksanakan fungsi kepalangm erahan	T seluruh DIY yang memiliki PMR/KSR	pendampin gan	DIY (250 sekolah), dan KSR di DIY (13 perguruan tinggi)	
NO	KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PIC
				PROSES	HASIL	
<b>PRIORITAS 3 : INVENTASI DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA UNTUK KETAHANAN</b>						
1	Mitigasi Struktural dalam Rebahrekon lintas sektor	Peningkatan ketahanan masyarakat bangunan (building code, dll)	DIY	Pemberian bantuan: BKK (bantuan khusus keuangan ke desa dan ke kecamatan)	Bantuan sampai ke lokasi dan dikelola dengan baik secara prosedural	BPBD
2	Relokasi rumah	Pengurangan risiko bencana sekaligus membangun lebih baik	Gedangsari Gunungkidul	Pemberian bantuan	Bantuan relokasi tepat sasaran dan tepat guna, sasaran 20 KK	BPBD
3	PENATAAN WILAYAH PERBATASAN	Meminimalisir konflik di wilayah perbatasan	Kab/kota dan wilayah DIY	Rapat koordinasi intern dan antar wilayah	Kesepakatan koordinasi tentang penataan wilayah perbatasan	SETDA Prop
4	Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	4 kab	sosialisasi, pelatihan	meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan di	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

					DIY sebesar 45 ton dari tahun 2016 sebesar 405 ton beras menjadi 450 ton beras pada tahun 2017	
5	Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Gerakan Pola Pangan Beragam Berizi Seimbang dan Aman	4 kab	kampanye pemanfaatan pekarangan, workshop, informasi pangan	Dukungan 2,35% terhadap terwujudnya penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun 2016 sebesar 85% (sampel aman 499, total sampel 586) menjadi 90% (sampel aman 799, total sampel 886) pada tahun 2017	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
6	Pemberdayaan dan Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	Pelatihan pengembangan pangan pokok lokal terlaksana	4 kab	pelatihan	Dukungan 1,47% terhadap terwujudnya penganekaragaman konsumsi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dan Dinas Pertanian

					dan keamanan pangan pada tahun 2016 sebesar 85% menjadi 90% pada tahun 2017	
7	Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat	Distribusi pangan masyarakat terlaksana	4 kab	stabilisasi harga pangan pokok di tingkat petani dan di daerah rawan pangan, informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	Terwujudnya distribusi dan akses pangan sebesar 100% (lokasi 5 kab/kota, jumlah komoditas, waktu 52 minggu)	
8	Pemeliharaan dan perawatan Ambulans	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan Ambulans	Ambulans siap pakai	RS Jiwa Grhasia
9	Pemeliharaan dan perawatan peralatan radio komunikasi	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan peralatan radio komunikasi	Alat komunikasi siap pakai	RS Jiwa Grhasia
10	Pemeliharaan dan perawatan peralatan medis	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Pemeliharaan dan perawatan peralatan medis	Alat Medis siap pakai	RS Jiwa Grhasia

11	Pembentukan Desa Siaga Sehat jiwa di Kelurahan/desa kab/kota	Untuk kesiapsiagaan	5 Kab/Kota	Pembentukan Desa Siaga Sehat jiwa di Kelurahan/desa kab/kota	Terbentuknya desa DSSJ	RS Jiwa Grhasia
12	Pemeliharaan Sirene tanda bahaya	Untuk kesiapsiagaan	RS Jiwa Grhasia	Pemeliharaan Sirene tanda bahaya	Sirene siap pakai	RS Jiwa Grhasia
13	Penyelenggaraan perlindungan masyarakat terkait Potensi SAR di masyarakat	Peningkatan Kesiapsiagaan	4 kab,1 kota di DIY	Perekrutan pelatihan potensi SAR di masyarakat	Terekrut dan terlatihnya 40 orang per kab/kota untuk SAR	Satpol PP
14	Pembinaan anggota SATLINMAS untuk SAR Laut	Peningkatan Kesiapsiagaan	DIY	Perekrutan pelatihan potensi SAR di masyarakat, khususnya SAR laut	Terekrut dan terlatihnya 30 orang untuk potensi SAR laut	Satpol PP
15	Pengadaan jaringan area traffic control system	Backup pengaturan lalulintas dari dan ke lokasi bencana	DIY	Pengadaan barang dan jasa	Aktifnya area traffic control dan running text	Dishub
16	Pengadaan APILL	Pengaturan jalan mencegah kecelakaan lalulintas	DIY	Pengadaan barang dan jasa	Aktifnya APILL	Dishub
17	Pengadaan peralatan prekursor gempa	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa bumi	DIY	Pengadaan Barang an Jasa sesuai dengan prosedur, instalasi, dan pengaktifan	Peralatan prekursor gempa bumi beroperasi dengan baik	BMKG

18	Karya Bhakti	Peningkatan upaya kebersihan dan penataan lingkungan setiap desa di DIY	DIY	Koordinasi kebersihan dan penataan lingkungan per desa	Meningkatnya budaya ketahanan melalui kebersihan dan penataan lingkungan	Korem 072 Pamungkas
19	Swasembada Pangan	Peningkatan keswasembadaan pangan di DIY	DIY, di setiap desa ada program ini	Pendampingan pertanian oleh personil TNI yang ditugaskan	Terlaksananya program pendampingan	Korem 072 Pamungkas
20	Gerakan nasional Indonesia Bersih	Peningkatan kerjasama antar pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan	DIY	Koordinasi dan pengerahan personil	Program terlaksana 4 kali dalam 1 tahun atau 3 bulan 1 kali	Korem 072 Pamungkas
21	Penanaman mangrove dan cemara udang di wilayah pesisir rawan tsunami	Pengurangan risiko bencana tsunami	DIY 2017 di Baros, Samas	Penanaman cemara udang atau mangrove sesuai dengan kebutuhan	Terhijaukannya wilayah pantai, berkurangnya risiko bencana tsunami  Terlaksana 4 kali 1 tahun	TNI Angkatan Laut LANAL DIY
22	Kegiatan Bersih Pantai	Backup untuk kebersihan lingkungan	DIY	Kerja bakti	Pantai bersih dan terawat, 1 tahun 2-3	TNI Angkatan Laut LANAL

					kali	DIY
23	Penghijauan wilayah Bandara (seputar kali kuning)	Peningkatan keasrian bandara sekaligus pengurangan potensi tergerusnya tanah bandara	Bandara Adisucipto	Penanaman 1000 pohon di sekitar bandara	1000 pohon tertanam	TNI AU
24	Simulasi Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan kesiapsiagaan bandara	Bandara Adisucipto	Pelaksanaan: a. Latihan 1 kali 1 tahun; b. Pemadaman kebakaran 1 kali 1 tahun c. Latihan SAR Laut 1 kali 1 tahun	Terlatihnya personil bandara beserta tim kerjanya	TNI AU
25	Optimalisasi pengelolaan bidang maal Koperasi GEMI	pengelolaan kelembagaan maal YP2SU dan Koperasi GEMI	DIY dan Jateng	perumusan target, eksekusi target, rekrutmen SDM maal, dll	mengumpulkan dana maal minimal Rp.1 milyar 1 tahun	Yayasan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU)
26	Kampanye Energi Bersih dan Terbarukan	Peningkatan public awareness untuk Penggantian sumber energi	DIY	Sosialisasi ke sekolah (6 kali pd 2017), kampus perguruan tinggi (4	Peningkatan public awareness terhadap pentingnya energi bersih dan	WALHI

		kotor (batubara) menjadi energi bersih dan terbarukan		kali pd 2017), melalui media mainstream dan media sosial	terbarukan	
27	Pelatihan rutin kesiapsiagaan per sekolah/PT oleh PMR/KSR	Peningkatan kesiapsiagaan bencana	Semua sekolah? PTdi DIY	Pelatihan rutin	<p>Terlatihnya materi dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapsiagaan bencana</li> <li>-PPPK</li> <li>-Perilaku hidup sehat</li> <li>-Gerakan palang merah</li> </ul> <p>Tercapai target jam materi 80 JPL untuk sekolah dan 120 JPL per perguruan tinggi</p>	PMI
28	Pelatihan Pembina PMR	Terlatihkannya pembina PMR untuk pembinaan PMR sekolah	DIY	Pelatihan	Terlatihnya 30 orang pembina PMR per tahun	PMI

29	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknya pilot project Desa Tangguh Bencana	DIY (1 tahun 1 desa/kelurahan tiap kabupaten/kota)	Pelatihan dan pendampingan	Terbentuknya desa tangguh 1 tahun 1 desa/kelurahan tiap kabupaten/kota	PMI
----	--------------------------------	---	--	----------------------------	--	-----

NO	KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA		PIC
				PROSES	HASIL	
<b>PRIORITAS 4 : Pemulihan yang Lebih Baik</b>						
1	Pelatihan PPGD untuk Perawat/PPGD Lapangan	Untuk kesiapsiagaan tanggap darurat dan rekonstruksi	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pelatihan PPGD untuk Perawat/PPGD Lapangan	10 Perawat terlatih PPGD	RS Jiwa Grhasia
2	Pelatihan ATLS untuk Dokter	Untuk kesiapsiagaan tanggap darurat dan rekonstruksi	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pelatihan ATLS untuk Dokter	2 Dokter terlatih ATLS	RS Jiwa Grhasia
3	Pelatihan ACLS untuk Dokter	Untuk kesiapsiagaan tanggap darurat dan rekonstruksi	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pelatihan ACLS untuk Dokter	4 Dokter terlatih ACLS	RS Jiwa Grhasia
4	Pelatihan Simulasi Evakuasi Pasien	Untuk kesiapsiagaan tanggap darurat dan rekonstruksi	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pelatihan Simulasi Evakuasi Pasien	1 kali simulasi evakuasi pasien	RS Jiwa Grhasia
5	Pelatihan PFA bagi perawat	Untuk kesiapsiagaan tanggap darurat dan rekonstruksi	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Pelatihan PFA bagi perawat	5 Perawat terlatih PFA	RS Jiwa Grhasia

6	Memobilisasi dokter dan perawat untuk tanggap darurat	Untuk kesiapsiagaan tanggap darurat dan rekonstruksi	RS Jiwa Grhasia	Terlaksananya Memobilisasi dokter dan perawat untuk tanggap darurat	Dokter dan perawat termobilisasi	RS Jiwa Grhasia
7	Gladi lapangan per bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan	4 kab,1 kota di DIY	Gladi lapangan didasarkan atas bencana prioritas usulan dari Satpol PP Kab/Kota, materi a.l. evakuasi dan PPGD	Target 100 personel per tahun	Satpol PP
8	Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB)	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana G. Merapi	G. Merapi	5 WLPB	5 Desa dengan rencana kontijensi	BPPTKG
9	Pembuatan sekat bakar untuk hutan-hutan rawan kebakaran	Meminimalisir area risiko kebakaran hutan	Kabupaten Bantul	Pemetaan hutan, diikuti dengan pembuatan sekat bakar dan pengawasan	Berkurangnya risiko kebakaran hutan dan lahan	BKSDA
10	Gladi Posko kedaruratan	Peningkatan kesiapsiagaan personil	Bantul (2017)	Gladi posko untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana	Terlaksananya gladi posko	Korem072 Pamungkas

11	Penghijauan	Perbaiki lingkungan pada DAS, lahan tidur, dan pemukiman	DIY	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI menyediakan personil	Terkoordinasinya kerjasama antara TNI dengan Pemda dalam penghijauan	Korem072 Pamungkas
12	Membuat rencana kesiapsiagaan individu dengan disabilitas	Memastikan bahwa kesiapsiagaan bencana di desa juga inklusif untuk orang dengan disabilitas	Desa Jatimulyo Kab Kulon Progo	Orang dengan disabilitas berpartisipasi dalam penyusunan kesiapsiagaan desa dengan menyusun kesiapsiagaan individu	Tersedia rencana kesiapsiagaan individu dengan disabilitas yang ada di desa dan diketahui oleh stakeholder terkait	YAKKUM Emergency Unit
13	Membuat rencana kesiapsiagaan individu dengan disabilitas psikososial	Memastikan bahwa kesiapsiagaan bencana di desa juga inklusif untuk orang dengan disabilitas psikososial	Kab Kulon Progo, Gn Kidul, Sleman	Orang dengan disabilitas psikososial berpartisipasi dalam penyusunan kesiapsiagaan desa dengan menyusun kesiapsiagaan individu	Tersedia rencana kesiapsiagaan individu dengan disabilitas yang ada di desa dan diketahui oleh stakeholder terkait	
14	Pengadaan dan pengelolaan mobile clinic desa	Percepatan akses medis ke kelompok rentan di lokasi	55 desa di DIY, prioritas di sekitar Merapi	Pengadaan, pengelolaan mobile clinic melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif	Kelompok rentan bencana (ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas) terlayani dengan baik.	PKBI

Strategi spesifik penanggulangan bencana di wilayah propinsi Yogyakarta juga di susun berdasarkan peran para pihak untuk setiap ancaman dapat di lihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 : Strategi Penanggulangan Bencana Berdasarkan Jenis Ancaman

No	Jenis Ancaman	Kegiatan	Indikator	Keterlibatan Instansi		Lokasi
				Utama	Pendukung	
<b>Pra bencana : Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>						
1	Banjir	1. Penghijauan melalui wono deso dan telaga desa 2. Merti kali dilakukan di 60 titik sungai 3. Koordinasi gerakan bersih sungai 4. Pembentukan kelompok pengelolaan sampah mandiri	Tiap desa mampu mengembangkan wonodeso dan telogo deso	BLH	Bappeda Biro kesra Biro hukum PU BLH	
		Normalisasi badan sungai	Kondisi badan sungai kembali berfungsi	PU		
		Kajian dan evaluasi peraturan perundangan	Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung upaya PRB	Biro hukum		
		Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan	Tersinkronisasinya kebijakan-kebijakan masing-masing OPD yang berprespektif PRB	BPBD		
		Mainstriming PRB dalam semua sektor	Setiap OPD mempunyai program atau kegiatan yang responsive PRB	BPBD		
		Kajian risiko bencana banjir berbasis daerah aliran sungai	Teridentifikasinya factor-faktor penyebab banjir dalam wilayah DAS	BPBD		
		Peningkatan kapasitas masyarakat dan mahasiswa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan mahasiswa terkait PRB	BPBD		
		1. membersihkan sampah sungai 2. menggali sungai 3. membuat bronjong	1. sampah kiriman, 2. pendangkalan sungai 3. normalisasi sungai	Gembiralola		Sungai Gajahwong
		Pengembangan program arsip vital (untuk melindungi dokumen/ arsip)	Optimalisasi pengelolaan dokumen/arsip	BPAD		
		1. membentuk dan melantik struktur kelembagaan 2. mengadakan perekrutan anggota 3. menyelenggarakan diklat	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMUKA KWADA DIY		5 kwarcab
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY

		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a.untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
2	Banjir bandang	1. membentuk dan melantik struktur kelembagaan 2. mengadakan perekrutan anggota 3. menyelenggarakan diklat	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwardcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMU KA KWARD A DIY		5 kwardcab
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a.untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
3	Tanah longsor	Kajian kondisi wilayah	Teridentifikasinya factor-faktor penyebab/potensi bencana longsor			
		Memperketat izin pendirian bangunan di daerah rawan longsor	Tidak ada bangunan/pemukiman yang didirikan di daerah rawan longsor			
		1. Suplai air bersih, 2. membantu yang terdampak		BAZNA S TANGG		

				AP BENCA NA DIY (BTB DIY)		
		1. Penggalangan dana, 2. menyalurkan dana kepada yang terdampak		BAZNA S TANGG AP BENCA NA DIY (BTB DIY)		
		Mendesain alat EWS longsor sederhana dengan pendekatan partisipatif	Tersedianya EWS longsor berbasis masyarakat	PSBA UGM		Kulonprogo
		1. membentuk dan melantik struktur kelembagaan 2. mengadakan perekrutan anggota 3. menyelenggarakan diklat		PRAMU KA KWARD A DIY		
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
4	Kekeringan	Penghijauan	Berkurangnya lahan kritis	Kehutana n		
		Pembangunan waduk	Tiap desa di wilayah rawan kekeringan memiliki waduk atau cadangan sumber air	PU		
		Kerjasama untuk penyediaan air, digunakan saat kekeringan	Terbangunnya kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan air untuk wilayah rawan kekeringan	BPBD		
		1. Suplai air bersih, 2. membantu yang terdampak		BAZNA S		

				TANGGAP BENCANA DIY (BTB DIY)		
		1. Penggalangan dana,2. menyalurkan dana kepada yang terdampak		BAZNAS TANGGAP BENCANA DIY (BTB DIY)		
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a.untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
5	<b>Gunung Merapi</b>	1. Penguatan ketangguhan masyarakat	1. 5 Desa Tangguh Bencana di kecamatan cangkringan	BPBD		Desa Glagaharjo, Kecamatan Cankringan
		2. Pengawasan atas pelaksanaan tata guna lahan rawan bencana (KRB)	2. Ada peta kawasan Rawan bencana yang di pahami dan di sepakati bersama di 5 desa pada kawasan rawan bencana merapi	BPBD		Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan
		3. Mengoktimalkan untuk menghindari daerah zona merah	1. Ketersediaan lahan untuk relokasi	BPBD,		
		4. Tata ruang	2. Pemahaman	PU		

			masyarakat untuk peta bencana			
		5. Pelatihan kpasitas ekonomi (kewirausahaan) 6. Pengembangan wirausaha baru	3.	Desperindak		
		7. Jalur evakuasi dan sistem informasi 8. Sistem lalu lintas berbasis evakuasi	Jalur evakuasi tidak hanya satu jalur	Perhubungan		
		1. Aplikasi bencana 2. Peningkatan kapasitas di tingkat sekolah 3. Pendampingan ibu2 4. Pelatihan dan pengorganisasian relawan 5. Kajian dalam penanganan bencana	System informasi Tas siaga bencana Kesadaran terhadap diri sendiri dalam menghadapi bencana	Poha Ugm		Cangkringan, winongo
		6. Peta kerawanan		Dinas kehutanan		
		7. Pembelajaran luar sekolah dalam memahami hewan 8.		gembiralo		
		9. Sosialisasi kesehatan reproduksi dalam bencana 10. Gender, hiv aids		Pkbi		
		11. 1. pelatihan : PRBBK/gugus depan, manajemen bencana, manajemen kedaruratan, pencarian dan penyelamatan, sphere, kesiapsiagaan. 2. penyusunan SOP	1. terwujudnya keahlian anggota sesuai pengembangan kemampuan diri. 2 adanya spesifikasi kemampuan anggota yang bisa dibentuk unit khusus	PRAMUKA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY

		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		Advokasi gender equality pada perempuan di daerah rawan bencana	1. peningkatan ketangguhan bagi perempuan 2. integrasi pengambilan kebijakan mendorong ketangguhan di bidang ekonomi	Aksara		Sleman
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
6	Kebakaran hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ilaran api ( ruang yang bersih di pinggirjalan kawasan hutan )</li> <li>2. Sosialisasi terhadap bencana kebakaran</li> <li>3. Pelatihan pemadaman kebakaran hutan dengan MANGGALAKNI</li> <li>4. Knservasi hutan (untuk ketersediaan air )</li> </ol>	Hulu, tengah, hilir	Dinas kehutana n	masyarakat	Paliyan pangan gunungkidul
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan	Aksara		OPD DIY

			kegiatan sensitive gender.			
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
7	Tsunami	1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
8	<b>Gempa Bumi</b>	1. Sosialisasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi	10 Desa setiap tahun			
		2. Update Kajian Risiko Bencana	Kajian dan Peta Risiko Bencana			
		3. Sekolah Madrasah Aman Bencana	10 sekolah setiap tahun			
		4. Pembuatan modul Penanggulangan Bencana untuk Inklusi				
		5. Penyusunan Rencana Kontinjensi				
		6. Pelatihan Simulasi Gempa Bumi	2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun			
		7. Diseminasi konstruksi bangunan tahan gempa	438 desa se-DIY, 301 desa yang rawan, 60 desa setiap tahun	BPBD	PUSDM (cipta karya), kominfo, Akademisi, BUMN,	
		Sekolah Aman Bencana	Warga sekolah memiliki keterampilan menghadapi ancaman bencana	KYPA		Sleman dan Bantul
		Komunitas tangguh bencana	Masyarakat siap siaga	KYPA		Sleman

			menghadapi ancaman			dan Bantul
		1. membentuk dan melantik struktur kelembagaan 2. mengadakan perekrutan anggota 3. menyelenggarakan diklat	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMU KA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise exercise : mampu memberikan pelayanan penanganan pasien korban bencana yang dirujuk di RS	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
9	<b>Gelombang Ekstrim dan Abrasi</b>	1. Sosialisasi Mitigasi Bencana Gelombang Ekstrim dan abrasi		BPBD		
		2. Update Kajian Risiko Bencana				
		3. Pembuatan modul Penanggulangan Bencana untuk Inklusi				
		4. Penyusunan Rencana Kontinjensi				
		5. regulasi terkait pembatasan pengambilan sedimen sungai dan pantai				
		6. penanaman tumbuhan penahan abrasi, angin dan gelombang				
		1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY

		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
10	<b>Epidemi Penyakit</b>	1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		Screening penyakit dari penduduk yang masuk ke DIY				
		PHBS / Germas : - masyarakat - PKL				
		Rekayasa genetik (wolbachia)				
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise exercise : mampu memberikan pelayanan penanganan pasien korban bencana yang dirujuk di RS	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana.	POHA UGM		DIY

		CARED siaga bencana kepada siswa	3. menyiapkan "tas siaga bencana"			
11	<b>Kegagalan Teknologi</b>	1. pelatihan-pelatihan, 2. pembinaan 3. penyiapan sarana dan prasarana	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan kegiatan sensitive gender.	Aksara		OPD DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise : mampu memberikan pelayanan penanganan pasien korban bencana yang dirujuk di RS	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
12	Cuaca Ekstrim	12. 1. pelatihan : PRBBK/gugus depan, manajemn bencana, manajemen kedaruratan, pencarian dan penyelamatan, sphere, kesiapsiagaan. 2. penyusunan SOP	1. terwujudnya keahlian anggota sesuai pengembangan kemampuan diri. 2 adanya spesifikasi kemampuan anggota yang bisa dibentuk unit khusus	PRAMU KA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. penyusunan rencana PB PMI. 2. pemetaan internal. 3. destana dan SSB	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. penyediaan relawan dan SDM. 2. PHBS di masyarakat	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kesepakatan-MOU. 2. pelatihan-pelatihan dengan mitra, 3. CSR	PMI		DIY
		1. mainstreaming PRB dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	1. mengenali risiko bencana dan gender gap dalam program dan kegiatan 2. mampu membuat program dan	Aksara		OPD DIY

			kegiatan sensitive gender.			
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	1. membuat peta siaga bencana di wilayah sekolah 2. mengerti menggunakan aplikasi CARED siaga bencana. 3. menyiapkan "tas siaga bencana"	POHA UGM		DIY
<b>Saat bencana :Tanggap Darurat</b>						
1	Banjir	Asessment dan tanggap darurat Sinergisitas multi pihak dalam database	Ketersedianya data yang valid Teridentifikasinya kebutuhan penyintas	BPBD		
		Pengelolaan sampah di pengungsian	Sampah di lokasi pengungsian terkelola dengan baik	BLH		
		Koordinasi distribusi logistic dan peralatan	Kebutuhan logistic tercukupi sesuai kebutuhan minimal.	BPBD		
		1. Terjun langsung dalam kejadian respon bencana 2. Lambung kemanusiaan	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMU KA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
2	Banjir bandang	1. Terjun langsung dalam kejadian respon bencana 2. Lambung kemanusiaan	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMU KA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY

		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
3	Tanah longsor	1. Terjun langsung dalam kejadian respon bencana 2. Lumbung kemanusiaan	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMUKA KWARTIR DIY		5 kwarcab
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
4	Kekeringan	1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
5	gunung merapi	1. Penguatan kapasitas Kaji Cepat Bencana	1. Ada team Kaji cepat di setiap desa di kawasan rawan bencana Merapi	BPBD		Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan

		Pengamanan jalan Evakuasi system lalu lintas	Proses evakuasi lebih berjalan lancar	Perhubungan	kepolisian	
		Mobilisasi sarana prasarana evakuasi (alat transportasi)		Perhubungan		
		Evakuasi satwa		gembiraloka		
		Kontijensi stok non food	Terpenuhi kebutuhan non food	KYPA		Sleman dan Bantul
		pendirian posko berbasis bumi perkemahan	1. terwujudnya keahlian anggota sesuai pengembangan kemampuan diri. 2 adanya spesifikasi kemampuan anggota yang bisa dibentuk unit khusus	PRAMUKA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise exercise : penanganan korban akibat gempa bumi sebagai RS rujukan pusat	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
6	Kebakaran hutan	1. Pelibatan masyarakat dan skpd setempat		Dinas kehutanan	masyarakat	Gunungkidul
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY

		memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa				
7	Tsunami	1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
8	<b>Gempa Bumi</b>	1. Kaji Cepat Bencana	1. Ada team Kaji cepat di setiap desa di kawasan rawan bencana Merapi	BPBD		
		2. Evakuasi dan Pertolongan Pertama				
		3. Pemenuhan standar minimum				
		Kontijensi stok non food	Terpenuhi kebutuhan non food	KYPA		Sleman dan Bantul
		1. Terjun langsung dalam kejadian respon bencana 2. Lumbung kemanusiaan	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudex tangguh bencana	PRAMUKA KWARTIR DIY		5 kwarcab
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise : penanganan korban akibat gempabumi sebagai RS rujukan pusat	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY

		memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa				
9	<b>Gelombang Ekstrem dan Abrasi</b>	1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
10	<b>Epidemi Penyakit</b>	1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise exercise : penanganan korban akibat gempabumi sebagai RS rujukan pusat	RSUP Dokter Sardjito		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
11	<b>Kegagalan Teknologi</b>	1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		meningkatkan koordinasi di cluster kesehatan	simulasi/ table top exercise exercise : penanganan korban	RSUP Dokter Sardjito		DIY

			akibat gempa bumi sebagai RS rujukan pusat			
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
12	Cuaca Ekstrem	pendirian posko berbasis bumi perkemahan	1. terwujudnya keahlian anggota sesuai pengembangan kemampuan diri. 2 adanya spesifikasi kemampuan anggota yang bisa dibentuk unit khusus	PRAMUKA KWARD A DIY		5 kwarcab
		1. mobilisasi sumberdaya 2. pelaporan	kesiapan sarpras dan SDM	PMI		DIY
		1. pemenuhan kebutuhan dasar. 2. mobilisasi sumberdaya	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		4. pelayanan sosial dan kesehatan	1. layanan ambulance dan kesehatan. 2. WASH	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. kemitraan dalam PB. 2. Koordinasi	PMI		DIY
		1. pelatihan Masyarakat dan siswa tanggap bencana : a. untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam upaya mitigasi b. untuk memperkenalkan aplikasi CARED siaga bencana kepada siswa	menggunakan aplikasi CARED untuk melaporkan situasi saat bencana	POHA UGM		DIY
<b>Pasca bencana :</b>						
1	Banjir	Pemulihan fisik Pemulihan psikologis Pemulihan perekonomian	Pulihnya kondisi infrastruktur masyarakat			
		1. Terlibat dalam proses pemulihan sesuai kebutuhan dan kemampuan 2. rehabrekon wirakarya/ bakti	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMUKA KWARD A DIY		5 kwarcab
		penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dalam recovery. 2. koordinasi	PMI		DIY
		1. pemantauan arus 2. pemantauan bronjong 3. pemantauan jembatan	1. sampah kiriman, 2. pendangkalan sungai 3. normalisasi sungai	Gembiral ola		Sungai Gajahwong
2	Banjir bandang	1. Terlibat dalam proses pemulihan sesuai kebutuhan dan kemampuan 2. rehabrekon wirakarya/ bakti	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh	PRAMUKA KWARD A DIY		5 kwarcab

			bencana			
		penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
3	Tanah longsor	1. Terlibat dalam proses pemulihan sesuai kebutuhan dan kemampuan 2. rehabrekon wirakarya/ bakti	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudex tangguh bencana	PRAMUKA KWARTIR DIY		5 kwarcab
		penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
4	Kekeringan	penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
5	Gunung Merapi	1. Penguatan kapasitas Pengkajian kerusakan dan kerugian pasca Bencana (JITUPASNA)	1. Ada team JITUPASNA di Tingkat Desa di kawasan rawan bencana Merapi	BPBD		Desa Glagaharjo, Kecamatan Cankringan
		1. pemulihan jalur lebih lancar	Jalan-jalan lebih terkondisi	Perhubungan		
		1. pomosi melalui pameran (tempat binaan dari disperindak)		disperindak		
		1. Trauma healing (membawa anak2 dan lansia berwisata ke gembiraloka)		gembiraloka		Wilayah terdampak
		1. Trauma healing dan psikososial untuk ibu2 dan anak2		Rifka annisa		Wilayah terdampak
		1. Pelatihan dan pendampingan dan pemasarannya 2. Transmigrasi local maupun luar wilayah		disnakertans		Wilayah terdampak
		penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
		kajian dampak bencana bagi perempuan wirausaha	1. peningkatan ketangguhan bagi perempuan 2. integrasi pengambilan kebijakan mendorong	Aksara		Sleman

			ketangguhan di bidang ekonomi			
		mengurangi dampak bencana secara psikolog	1. trauma healing 2. psikososial 3. menyalurkan donasi logistik dari berbagai bantuan	Rifka Anisa		DIY
6	Kebakaran hutan dan Lahan	1. Pembagian bibit	penghijuan	Dinas kehutanan	masyarakat	Wilayah hutan di Jogjakarta
		penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
7	Tsunami	penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
8	<b>Gempa Bumi</b>	Pengkajian kerusakan dan kerugian paska Bencana (JITUPASNA) : - Sarpras - Komunikasi dan Informasi - Ekonomi - -	1. Ada team JITUPASNA di Tingkat Desa di kawasan rawan bencana	BPBD		
		Pemulihan Awal (Recovery) : - Trauma Healing - Fisioteraphy - Pemulihan Ekonomi - Penyaluran bantuan - Penanganan Disabilitas - Pemenuhan kebutuhan obat – obatan				
		Rehabilitasi dan atau Rekonstruksi struktural dan non struktural				
		1. Terlibat dalam proses pemulihan sesuai kebutuhan dan kemampuan 2. rehabrekon wirakarya/ bakti	1. Terbentuknya struktur kelembagaan di setiap kwarcab. 2. aktif berkegiatan 3. Gudep tangguh bencana	PRAMUKA KWARD A DIY		5 kwarcab
		penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
		mengurangi dampak bencana secara psikolog	1. trauma healing 2. psikososial 3. menyalurkan donasi logistik dari berbagai bantuan	Rifka Anisa		DIY
9	<b>Gelombang Ekstrim dan Abrasi</b>	penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY

10	<b>Epidemi Penyakit</b>	penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
11	<b>Kegagalan Teknologi</b>	penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY
12	Cuaca Ekstrim	penyediaan kebutuhan pasca bencana	adanya pemetaan SDM	PMI		DIY
		5. kerjasama dan kemitraan	1. CSR dala recovey. 2. koordinasi	PMI		DIY

## B. Pagu Indikatif

Secara umum, setiap kegiatan memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi yang terlibat dalam 5 tahun masa perencanaan ini. Spesifik pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi amat bergantung pada sistem dan mekanisme yang berlaku pada saat pelaksanaan perencanaan. Spesifik pekerjaan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab instansi dimasukkan ke dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan OPD dan organisasi masyarakat sipil, Swasta dan Akademisi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada indikator pencapaian, harus merujuk pada lokasi-lokasi yang harus diprioritaskan. Lokasi-lokasi ini telah di analisa berdasarkan kajian risiko sehingga Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tergambarkan. Mekanisme zonasi dalam penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana kepada beberapa daerah yang paling rentan dan mendapatkan perhatian khusus sesuai dengan jenis ancaman bencana.

Indikator setiap program kegiatan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran, sekalipun dengan jumlah anggaran yang banyak belum merupakan jaminan bahwa indikator dari sebuah kegiatan akan tercapai. Namun begitu pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran secara maksimal untuk membiayai program kegiatan yang telah direncanakan. Selain harus mendorong adanya peranserta pihak swasta maupun masyarakat untuk berkontribusi terlaksananya kegiatan agar pencapaiannya bisa optimal.

### C. Anggaran Penanggulangan Bencana

Penghitungan anggaran pada pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana mengikuti sebuah strategi penganggaran yang membagi penganggaran penanggulangan bencana menjadi dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana.

Anggaran periodik akan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu anggaran yang secara khusus diperuntukan untuk upaya-upaya penanggulangan bencana maupun anggaran yang secara tidak langsung atau yang disebut dengan afirmatif. Kemudian apabila mengikuti siklus kebencanaan, maka anggaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anggaran pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Secara khusus pemerintah DIY belum mempunyai kebijakan tentang jumlah atau prosentase anggaran untuk penanggulangan bencana. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti RPB dan RAD PRB juga belum dipastikan apakah realisasinya sesuai dengan perencanaannya. Apabila diasumsikan anggaran penanggulangan bencana minimal 1% dari total belanja daerah, maka setiap tahun akan ada kenaikan anggaran penanggulangan bencana seiring dengan kenaikan belanja daerah.

Menengok APBD DIY Tahun 2017, pendapatan daerah mencapai Rp 4.988.379.317.714,63, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 5.183.583.874.001,43. Dengan demikian pada tahun 2017 mengalami defisit Rp 211.866.693.286,80.

#### 1. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.1.657.147.882.128,63. Adapun kontribusi terbesar dari PAD bersumber dari Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.437.942.970.424,00. Pendapatan lainnya adalah dari Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.461.741.043.739,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 869.490.391.847,00.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Jangan sampai upaya-upaya meningkatkan pendapatan asli daerah namun justru berdampak pada meningkatnya kerentanan dan risiko atas

potensi kejadian bencana. Dengan demikian setiap rencana kegiatan harus dilakukan kajian dampak risikonya, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Belanja.

Mengingat bahwa DIY merupakan daerah rawan bencana, sudah semestinya dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran harus memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Program kegiatan dan anggaran penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggungjawab dari BPBD, namun menjadi tanggungjawab dari semua OPD. Sehingga setiap OPD akan memiliki program kegiatan dan anggaran pengurangan risiko bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Selain anggaran yang menempel pada kegiatan di masing-masing OPD, Pemerintah DIY juga mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 24.919.724.742,20. Salah satu fungsi anggaran ini dapat digunakan sewaktu-waktu terjadi bencana, sebagai pemenuhan kebutuhan tanggap darurat.

Pada tahun 2017 dapat dilihat beberapa program kegiatan beserta anggaran untuk penanggulangan bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung, Anggaran tersebut dapat di lihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.6 : Anggaran Penanggulangan Bencana tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pencegahan Dini Bencana	6.574.875.525	BPBD
2	Program Penanggulangan Korban Bencana	4.522.840.000	BPBD
3	Program Pemulihan Pasca Bencana	2.213.686.600	BPBD
4	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	3.324.290.000	DINAS KESEHATAN
5	Program Pengelolaan Persampahan	12.250.000.000	PU ESDM
6	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	8.649.824.000	PU ESDM
7	Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan	4420618700	PU ESDM
8	Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana	27.664.200	DINAS SOSIAL
9	Program Peningkatan Penanganan	1.006.732.700	BADAN

	Daerah Rawan Pangan		KETAHANAN PANGAN
10	Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	69.3845.908	BADAN KETAHANAN PANGAN
11	Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	207.7940.000	BADAN KETAHANAN PANGAN
12	Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan	211.292.500	BADAN KETAHANAN PANGAN
13	Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	3.585.000.000	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
14	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.2075.044.500	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
15	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim	360.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	97.1065.700	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
17	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2.889.197.200	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
18	Total Anggaran	65,853,917,533	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana pada tahun 2017 sebesar Rp 65.853.917.533 atau 1,27% dari total belanja. Alokasi anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk upaya-upaya pengurangan risiko bencana, seperti ancaman rawan pangan akibat kemarau atau banjir. (Melihat anggaran tahun 2017 bagaimana strategi rencana anggaran untuk 5 tahun selanjutnya. Dengan melihat trend APBD yang selalu naik dan potensi bencana yang tinggi)

Sedangkan berdasarkan pada Indikasi Rencana Program Prioritas BPBD Propinsi tertuang dalam Rencana Awal RPJMD 2017-2022 besaran anggaran dalam rangka penanggulangan Bencana dapat dilihat pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5.7. Anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2017-2022

No	Program	Pagu Indikatif setelah Rasionalisasi
		(dalam Milyar Rupiah)
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<b>20.914.819.000</b>
2	Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	<b>41.008.247.000</b>
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana	<b>22.262.000.000</b>
<b>Total</b>		<b>84.185.066.000</b>

Anggaran kedua dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan anggaran on call (siap pakai) Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila dari hasil kajian cepat bencana diperoleh bahwa anggaran penanganan dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka rekomendasi status darurat bencana nasional akan direkomendasikan kepada Kepala BNPB. Kondisi ini juga berlaku bila akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam satu tahun telah melebihi jumlah anggaran siap pakai, maka untuk kejadian bencana selanjutnya akan diberikan rekomendasi status darurat bencana nasional oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala BNPB.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

#### **A. Monitoring Dan Evaluasi**

Monitoring yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
- b. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu

rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan para pihak, seperti masyarakat, CSO, Media dan Akademisi serta praktisi yang berkopeten dalam bidang penanggulangan bencana. Keterlibatan aktif para pihak dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kendala yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam RPB Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Evaluasi pelaksanaan dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPB Daerah Istimewa Yogyakarta, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 6.1 : Format Monitoring Dan Evaluasi**

Kegiatan	Alokasi	Sasaran (Target)	Pencapaian (Realisasi)	Sumber Pendanaan		Keterangan (Tindak Lanjut)
				Apbd	Lain-Lain	

Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak eksternal, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait.

## **B. Pelaporan**

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPB. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Istimewa Yogyakarta disusun untuk rentang perencanaan 2018-2022.

Pelaksanaan isi dari dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah, Dunia Usaha, CSO, Media dan Akademisi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga terwujudnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka, Tanggap Dan Tangguh Terhadap Bencana sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan rencana penanggulangan bencana perlu dilakukan kontrol, monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, lingkungan dan atau kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses kontrol, monitoring dan evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan risiko bencana akan memberikan gambaran lebih detil dan teknis untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk turut serta dan berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka, Tanggap dan Tangguh Terhadap Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X